

Perubahan

# KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Allah SWT, karena berkat rahmat dan hidayah-Nya penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2018 - 2023 dapat terselesaikan dengan baik.

Rencana Strategis (RENSTRA) merupakan rencana jangka menengah periode lima tahun ke depan yang disusun dengan mempertimbangkan berbagai keadaan dan pelayanan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dengan tetap mengacu pada RPJMD Kabupaten Pasuruan 2018 - 2023, terutama menyangkut keunggulan, peluang, kendala dan tantangan dalam ruang lingkup Tupoksi OPD. RENSTRA diharapkan dapat dijadikan sebagai pedoman dan arahan dalam upaya mencapai sasaran - sasaran pembangunan yang telah ditetapkan selama lima tahun.

Renstra ini tidak begitu bermakna tanpa ditindaklanjuti dengan pelaksanaan program dan kegiatan strategis yang efisien dan efektif dilandasi komitmen yang tinggi dalam mewujudkan visi misi, tujuan dan sasaran organisasi. Harapan kami, RENSTRA ini dapat dijadikan pedoman jangka menengah dan sekaligus sebagai acuan rencana kerja tahunan bagi Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Pasuruan.

Rencana Strategis ini merupakan suatu keharusan bagi OPD untuk mengarahkan pelayanan OPD khususnya dan Pembangunan Daerah pada umumnya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan, serta harus mampu menjawab 3 (tiga) pertanyaan mendasar yaitu :

1. Apa yang akan dicapai oleh OPD dalam 5 (lima) tahun ke depan.

2. Bagaimana cara mencapainya.

3. Langkah-langkah strategis apa yang dilakukan untuk mencapai tujuan.

Kami menyadari Renstra ini mungkin masih banyak kekurangannya, meskipun demikian kami berharap dengan Renstra ini semua kebijakan, program dan kegiatan yang telah disusun harus mengarah kepada tujuan dan sasaran yang telah disepakati serta dapat dijadikan pedoman dalam pelaksanaannya untuk mendukung pencapaian Visi Pemerintah Kabupaten Pasuruan khususnya.

Demikian Rencana Strategis ini disusun, semoga Allah SWT melimpahkan rahmat dan karunia-Nya untuk kelancaran serta keberhasilan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Pasuruan dalam berupaya mewujudkan visi dan misinya.

Pasuruan, 2022

BUPATI PASURUAN

M. IRSYAD YUSUF

# DAFTAR ISI

[KATA PENGANTAR 1](#_Toc101185512)

[DAFTAR ISI i](#_Toc101185513)

[BAB I PENDAHULUAN 1](#_Toc101185514)

[1.1 Latar Belakang 1](#_Toc101185515)

[1.2 Landasan Hukum 2](#_Toc101185516)

[1.3 Maksud dan Tujuan 6](#_Toc101185517)

[1.4 Sistematika Penulisan 7](#_Toc101185518)

[BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH 10](#_Toc101185519)

[2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah 10](#_Toc101185520)

[2.1.1 Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah 11](#_Toc101185521)

[2.1.2 Tugas Pokok dan Fungsi Sekertaris Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah 12](#_Toc101185522)

[2.1.3 Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Bidang Pendataan dan Pelaporan 12](#_Toc101185523)

[2.1.4 Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Bidang Pengendalian, Penagihan dan Pengembangan 13](#_Toc101185524)

[2.1.5 Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Bidang Aset 13](#_Toc101185525)

[2.1.6 Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Bidang Anggaran dan Belanja 14](#_Toc101185526)

[2.1.7 Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Bidang Akuntansi 14](#_Toc101185527)

[2.1.8 Tugas Pokok dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis Badan (UPT) 15](#_Toc101185528)

[2.2 Sumber Daya Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Dearah 18](#_Toc101185529)

[2.2.1 Kondisi Kepegawaian Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Pasuruan 18](#_Toc101185530)

[2.2.2 Kondisi Sarana Prasarana Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Pasuruan 18](#_Toc101185531)

[2.3 Kinerja Pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Pasuruan 19](#_Toc101185532)

[Capaian Kinerja Berdasarkan Sasaran dan tujuan dan sasaran Tahun 2021 20](#_Toc101185533)

[2.4 Tantangan Dan Peluang Pengembangan Pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah 27](#_Toc101185534)

[BAB III](#_Toc101185535) [PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH 29](#_Toc101185536)

[3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah 29](#_Toc101185537)

[3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih 31](#_Toc101185538)

[3.3 Telaahan Renstra Kementrian/Lembaga dan Renstra Provinsi 34](#_Toc101185539)

[3.3.1 Telaahan Renstra Kementrian Lembaga 34](#_Toc101185540)

[3.3.2 Telaahan Renstra Provinsi 35](#_Toc101185541)

[3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis 36](#_Toc101185542)

[3.4.1 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) 36](#_Toc101185543)

[3.4.2 Telaah Kajian Lingkugan Hidup Starategis (KLHS) 37](#_Toc101185544)

[3.5 Penentuan isu-isu strategis 37](#_Toc101185545)

[BAB IV TUJUAN DAN SASARAN 39](#_Toc101185546)

[4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah 39](#_Toc101185547)

[BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN 42](#_Toc101185548)

[BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN 45](#_Toc101185549)

[BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN 98](#_Toc101185550)

[BAB VIII PENUTUP 99](#_Toc101185551)

**DAFTAR TABEL**

[Tabel 2.1 Kondisi Sumber Daya Aparatur Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2021 18](#_Toc101182453)

[Tabel 2.2 Jumlah Asset yang dimiliki dan jumlah asset yang tidak dipakai (Rp) 19](#_Toc101182712)

[Tabel 2.3 Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Pasuruan 20](#_Toc101183113)

[Tabel 2.4 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Pasuruan 25](#_Toc101183372)5

[Tabel 3.1 Pemetaan Permasalahan Pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Pasuruan 29](#_Toc101183605)9

[Tabel 3.2 Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah terhadap pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Pasuruan 32](#_Toc101183780)2

[Tabel 3.3 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah Berdasarkan Sasaran K/L 34](#_Toc101183941)4

[Tabel 3.4 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah Berdasarkan Sasaran Provinsi 35](#_Toc101184098)5

[Tabel 3.5 Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah ditinjau dari implikasi RTRW 36](#_Toc101184230)6

[Tabel 3.6 Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah ditinjau dari implikasi KLHS 37](#_Toc101184393)7

[Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah Dinas/Badan/Kecamatan/Sekretariat 39](#_Toc101184628)9

[Tabel 5.1 Tujuan, Sasaran, Starategi dan Kebijakan 42](#_Toc101185102)2

[Tabel 6.1 Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Pasuruan 46](#_Toc101185231)6

[Tabel 7.1 Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD 98](#_Toc101185418)8

**DAFTAR GAMBAR**

[Gambar 4.1 *Logical Framework* Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah Kabupaten Pasuruan](#_Toc101185774) 40

[Gambar 4.2 *Cascading* Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah Kabupaten Pasuruan](#_Toc101186086) 41

LAMPIRAN

:

PERATURAN BUPATI PASURUAN

NOMOR

:

TAHUN 2022

TANGGAL

:

2022

# BAB I PENDAHULUAN

## Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 272-273, Rencana Strategis yang selanjutnya disingkat dengan Renstra memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah. Dalam Permendagri No 86 Tahun 2017 Pasal 1 ayat 29, Rancangan Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

Renstra Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2018-2023 merupakan dokumen perencanaan bersifat teknis operasional yang menjabarkan RPJMD Kabupaten Pasuruan Tahun 2018-2023. Rencana Strategis (Renstra) Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Pasuruan yang berlandaskan pada RPJMD Kabupaten Pasuruan berfungsi untuk menjabarkan visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati, Pemerintah Kabupaten Pasuruan dalam penyelenggaraan pembangunan daerah.

Renstra Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah setiap tahunnya selama kurun waktu lima tahun. Renstra Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah juga menjadi acuan dalam mengendalikan dan mengevaluasi pembangunan pada lingkungan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah. Selain itu, Renstra berperan sangat penting dalam menuntun Perangkat Daerah untuk berkonstribusi mewujudkan cita-cita dan tujuan pemerintah daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan mengoptimalkan penggunaan berbagai sumber daya yang dimiliki oleh daerah. Renstra Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah berkontribusi dalam mewujudkan tujuan pembangunan Kabupaten Pasuruan berkaitan dengan urusan keuangan.

Rensta Perubahan perlu disusun karena ada perubahan SOTK pada organisasi sebagaimana juga dengan tugas dan Fungsi pada organisasi tersebut, seiring dengan Perubahan RPJMD maka Renstra Perubahan perlu di susun.

Dalam menyusun Renstra Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah terdapat beberapa proses yang harus ditempuh yaitu dari persiapan penyusunan Renstra Perangkat Daerah, penyusunan rancangan Renstra Perangkat Daerah, penyusunan Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah, hingga penetapan Renstra Perangkat Daerah. Selain itu, dokumen Renstra memiliki keterkaitan dengan berbagai dokumen perencanaan, antara lain RPJMD, Renstra K/L dan Renstra provinsi/kabupaten/kota, dan Renja Perangkat Daerah. Keterkaitan antara Renstra Perangkat Daerah dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra provinsi/kabupaten/kota, dan dengan Renja Perangkat Daerah tersebut berupa penyusunan Renstra Perangkat Daerah mengacu pada tugas dan fungsi perangkat daerah sesuai dengan Peraturan Daerah tentang Perangkat Daerah Kabupaten, Peraturan Kepala Daerah Kabupaten tentang Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah, RPJMD Kabupaten dan memperhatikan Renstra Kementerian/Lembaga, Renstra Perangkat Daerah Provinsi, Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten dan Hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Kabupaten Pasuruan.

## Landasan Hukum

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2018-2023 didasarkan pada ketentuan peraturan perundangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
14. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus* *Disease* 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan;
15. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
16. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 – 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang pedoman nomenklatur perangkat daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota yang melaksanakan fungsi penunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1538);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
23. Peraturan menteri dalam negeri republik indonesia nomor 70 tahun 2019 tentang sistem informasi pemerintahan daerah.
24. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
25. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 Nomor 1 Tahun 2009 Seri E);
26. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 tentang Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur 2011-2031 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2012 Nomor 3 Seri D);
27. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 5 Seri D);
28. Peraturan Daerah P-RPJMD No 10 Tahun 2021 peraturan daerah kabupaten pasuruan nomor 10 tahun 2021 tentang perubahan atas peraturan daerah kabupaten pasuruan nomor 1 tahun 2019 tetang rencana pembangunan jangka menengah daerah kabupaten pasuruan tahun 2018–2023
29. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 16 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah;
30. Peraturan daerah kabupaten pasuruan nomor 8 tahun 2021 tentang perubahan kedua atas peraturan daerah nomor 16 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah
31. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 27 Tahun 2013 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Pasuruan, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan peraturan Bupati Pasuruan Nomor 15 Tahun 2016;
32. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 12 Tahun 2014 Tentang Sistem Dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Pasuruan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 36 Tahun 2016;
33. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 188 Tahun 2021 Tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Pasuruan
34. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 189 Tahun 2021 Tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Pasuruan

## Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Strategis dimaksudkan sebagai arahan dan pedoman bagi Perangkat Daerah untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan. Untuk itu maksud disusunnya Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2018-2023 adalah sebagai berikut :

* 1. Memberikan acuan resmi bagi Perangkat Daerah Kabupaten Pasuruan dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Kabupaten Pasuruan sekaligus menjadi acuan dalam menentukan program dan kegiatan tahunan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah Kabupaten;
  2. Menyediakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk kurun waktu lima tahun yang mencakup gambaran kinerja, permasalahan, isu strategis tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan perangkat daerah sebagai penjabaran dari RPJMD sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah.
  3. Menjabarkan gambaran tentang kondisi Perangkat Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi sekaligus memahami arah dan tujuan yang ingin dicapai dalam rangka mewujudkan visi dan misi Perangkat Daerah Kabupaten Pasuruan;
  4. Memudahkan seluruh jajaran aparatur Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dengan cara menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah dan terukur;
  5. Memudahkan seluruh jajaran aparatur Perangkat Daerah untuk memahami, menilai arah kebijakan, program dan kegiatan operasional tahunan dalam rentang waktu lima tahunan;
  6. Mengetahui apa yang menjadi kekuatan dan kelemahan organisasi guna mendukung dan memenuhi visi dan misinya untuk kurun waktu satu sampai lima tahun kedepan.
  7. Menyesuaikan Perubahan pada RPJMD Kabupaten Pasuruan Tahun 2018-2023.

Adapun tujuan penyusunan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2018-2023 antara lain:

* 1. Menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah yaitu untuk mendukung pencapaian visi dan misi Perangkat Daerah Kabupaten Pasuruan dan mewujudkan cita-cita yang ingin dicapai selama 5 tahun ke depan sesuai dengan tugas pokok, fungsi dan tanggung jawab yang diemban Perangkat Daerah Kabupaten Pasuruan;
  2. Memberikan arahan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan selama kurun waktu lima tahun dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah dalam mendukung Visi dan Misi kepala daerah;
  3. Menyediakan tolok ukur kinerja pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah untuk kurun waktu tahun lima tahun dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai dasar dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja perangkat daerah.
  4. Memberikan pedoman bagi seluruh aparatur perangkat daerah dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) perangkat daerah yang merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah tahunan dalam kurun waktu lima tahun.

## Sistematika Penulisan

Rencana Strategis Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2018-2023 ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I.

**PENDAHULUAN**

Pada bab ini dijelaskan dasar penyusunan dokumen Renstra Perangkat Daerah.

1. Latar Belakang
2. Landasan Hukum
3. Maksud dan Tujuan
4. Sistematika Penulisan

BAB II.

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah.

1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
2. Sumber Daya Perangkat Daerah
3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

BAB III.

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Pada bab ini dikemukakan hasil identifikasi permasalahan dan isu-isu strategis perangkat daerah.

1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah
2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra
4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
5. Penentuan Isu-Isu Strategis

BAB IV.

TUJUAN DAN SASARAN

Pada bab ini dijelaskan tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah Kabupaten Pasuruan beserta indikator kinerjanya.

**BAB V.**

**STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Pada bab ini dikemukakan rumusan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah Kabupaten Pasuruan dalam lima tahun mendatang.

BAB VI.

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Pada bab ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif Perangkat Daerah Kabupaten Pasuruan.

BAB VII.

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada bab ini dikemukakan indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Pasuruan.

BAB VIII.

PENUTUP

Pada bab ini memuat kesimpulan dari maksud dan tujuan penyusunan dokumen Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Pasuruan.

# BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

## Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 188 Tahun 2021 tentang Tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dilingkungan Pemerintah Kabupaten Pasuruan, maka Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Pasuruan mempunyai tugas membantu Kepala Daerah menyelenggarakan pembangunan di bidang pengelolaan keuangan dan asset daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana disebutkan di atas, Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Pasuruan meyelenggaraan fungsi:

1. Penyusunan kebijakan teknis bidang keuangan dan pendapatan;
2. Pelaksanaan dukungan teknis di bidang keuangan dan pendapatan;
3. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang keuangan dan pendapatan;
4. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah di bidang keuangan dan pendapatan;
5. Pelaksanaan administrasi badan di bidang keuangan dan pendapatan;
6. Penyusunan dan pelaksanaan kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD); dan
7. Pelaksanaan fungsi lain yang di berikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Selain fungsi-fungsi sebagaimana disebutkan diatas, Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah sebagai Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) selaku Bendahara Umum Daerah (BUD) memiliki fungsi sebagai berikut :

1. Membuat Surat Edaran Bupati tentang Penyusunan RKA berdasarkan hasil kesepakatan pembahasan KUA-PPAS;
2. Menyusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD;
3. Mengesahkan DPA/DPPA – PD dan DPA/DPPA PPKD;
4. Melakukan pengendalian pelaksanaan APBD;
5. Memberikan petunjuk tehnis pelaksanaan sistem penerimaan dan pengeluaran kas daerah;
6. Melaksanakan pemungutan pajak daerah;
7. Menerbitkan SPD;
8. Melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan daerah;
9. Menyajikan informasi keuangan daerah;
10. Melaksanakan kebijakan dan pedoman pengelolaan Barang Milik Daerah.

Susunan Organisasi Badan pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Pasuruan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah adalah sebagai berikut:

* + - Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
    - Sekretaris;
    - Kepala Bidang Pendataan, Penetapan dan Pelaporan;
    - Kepala Bidang Pengendalian, Penagihan Dan Pengembangan ;
    - Kepala Bidang Anggaran dan Belanja ;
    - Kepala Bidang Aset ;
    - Kepala Bidang Akuntansi ;
    - Kepala Unit Pelaksana Teknis Badan (UPT);
    - Kelompok Jabatan Fungsional

Peraturan Bupati No…… Tahun …

Tanggal ….. …………

### Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah sesuai ayat (1) mempuyai tugas pokok membantu bupati melaksanankan urusan pemerintah daerah di urusan keuangan Kepala Dinas juga mempunyai uraian tugas dan fungsi sesuai ayat (1) sebagai berikut:

1. penyusunan kebijakan teknis bidang keuangan dan pendapatan;
2. pelaksanaan dukungan teknis di bidang keuangan dan pendapatan;
3. penyusunan kebijakan teknis bidang keuangan dan pendapatan;
4. pelaksanaan dukungan teknis di bidang keuangan dan pendapatan;
5. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang keuangan dan pendapatan;
6. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah di bidang keuangan dan pendapatan;
7. pelaksanaan administrasi badan di bidang keuangan dan pendapatan;
8. penyusunan dan pelaksanaan kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD); dan
9. pelaksanaan fungsi lain yang di berikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### Tugas Pokok dan Fungsi Sekertaris Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah

Sekretaris mempunyai tugas pokok melaksanakan perumusan konsep dan pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian, pemantauan, evaluasi, pelaporan meliputi keuangan, hukum, informasi kehumasan, keorganisasian dan ketatalaksanaan, pembinaan ketatausahaan, kearsipan, kerumah tanggaan, kepegawaian, pengelolaan dan penatausahaan asset, dan pelayanan administrasi di lingkungan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah. Sekretaris dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi :

1. penyusunan perencanaan program dan kegiatan;
2. pelaksanaan dan pengelolaan administrasi badan pengelolaan keuangan dan pendapatan daerah yang meliputi administrasi perencanaan, administrasi umum, administrasi kepegawaian, dan administrasi keuangan;
3. pengelolaan administrasi perlengkapan, barang milik daerah dan/atau barang milik negara;
4. pengelolaan urusan rumah tangga kedinasan;
5. pelaksanaan koordinasi penyusunan program, anggaran dan peraturan perundang-undangan;
6. pelaksanaan koordinasi tugas-tugas bidang;
7. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan tata kelola organisasi;dan
8. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

### Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Bidang Pendataan dan Pelaporan

Bidang Pendapataan, Penetapan dan Pelaporan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan Fungsi bertanggungjawab kepada kepala Badan.

Untuk melaksanakan Fungsi Kepala Bidang mempunyai fungsi :

1. pelaksanaan penyusunan rencana, program kegiatan Bidang Pendataan, Penetapan dan Pelaporan;
2. pelaksanaan penyusunan petunjuk teknis lingkup Pendaftaran, pendataan, perhitungan, penetapan, serta Pembukuan dan pelaporan Pajak Daerah;
3. pelaksanaan pendaftaran, pendataan, perhitungan, penetapan, pembukuan dan pelaporan Pajak Daerah;
4. pelaksanaan pengelolaan peremajaan data dan informasi pajak daerah;
5. pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

### Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Bidang Pengendalian, Penagihan dan Pengembangan

Bidang Pengendalian, Penagihan dan Pengembangan; dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan Fungsi bertanggungjawab kepada kepala Badan.

Untuk melaksanakan Fungsi Kepala Bidang mempunyai fungsi :

1. pelaksanaan Perencanaan dan Pengendalian, Penagihan, Keberatan, Pengembangan dan Pembinaan, terhadap sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD);
2. pelaksanaan pembinaan teknis operasional kepada setiap unit kerja daerah yang melaksanakan pemungutan Pajak Daerah dan Pendapatan Asli Daerah (PAD);
3. penyusunan perencanaan pendapatan Pajak Daerah;
4. pelaksanaan pengembangan Pendapatan Asli Daerah (PAD);
5. pelaksanaan pemeriksaan Pajak Daerah;
6. pelaksanaan monitoring dan evaluasi Pendapatan Asli Daerah (PAD);
7. perumusan dan penyusunan Peraturan Pajak Daerah;
8. pelaksanaan Kajian dan identifikasi potensi Pajak Daerah;
9. pelaksanaan peraturan Pajak Daerah;
10. pelaksanaan penelitian dan pemeriksaan keberatan wajib pajak; dan
11. pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

### Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Bidang Aset

Bidang Asetmempunyai Fungsi pokok melaksanakan penyelenggaraan penatausahaan, perumusan kebijakan pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD).

Untuk melaksanakan Fungsi sebagaimana dimaksud, Bidang Aset mempunyai fungsi :

1. pelaksanaan penelitian dan menyiapkan bahan pertimbangan persetujuan RKBMD pengadaan dan RKBMD pemeliharaaan;
2. pelaksanaan penyusunan RKMD pengadaan dan RKBMD pemeliharaan;
3. pelaksanaan penyelenggaraan penelitian dokumen usulan pemanfaatan dan usulan pemindahtanganan;
4. pelaksanaan penyelenggaraan penelitian dokumen usulan penggunaan, pemanfaatan pemusnahan dan penghapusan;
5. pelaksanaan penyelenggaraan penatausahaan Barang Milik Daerah yang telah diserahkan dari Perangkat Daerah yang tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan fungsi Perangkat Daerah ke dalam daftar barang pengelola;
6. pelaksanaan penyelenggaraan pemusnahan atas Barang Milik Daerah pada daftar barang pengelola;
7. pelaksanaan pengamanan dan pemeliharaan terhadap Barang Milik Daerah yang telah diserahkan;
8. pelaksanaan penghimpunan daftar hasil pemeliharaan Perangkat Daerah;
9. pelaksanaan penyelenggaraan penyiapan dokumen asli kepemilikan Barang Milik Daerah;
10. pelaksanaan penyelenggaraan rekonsiliasi dalam rangka penyusunan laporan Barang Milik Daerah;
11. pelaksanaan penyusunan laporan Barang Milik Daerah Triwulan dan Tahunan;
12. pelaksanaan penyelenggaraan fasilitasi, bimbingan tekhnik dan monev di bidang pengelolaan Barang Milik Daerah;
13. Pelaksanaan Penilaian BMD, Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan BMD;
14. Pelaksanaan penyusunan satuan standart harga (SSH);
15. Pelaksanaan penyusunan standar BMD dan standar Kebutuhan BMD;
16. Pelaksanaan Penyusunan Kebijakan Pengelolaan BMD
17. melaksanakan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan

### Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Bidang Anggaran dan Belanja

Bidang Anggaran dan Belanja mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan penyusunan anggaran, belanja pegawai dan perbendaharaan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Bidang Anggaran Dan Belanja mempunyai tugas :

1. penyusunan program kerja bidang Anggaran dan Belanja untuk acuan pelaksanaan fungsi;
2. perumusan prosedur penyusunan Rancangan APBD dan Rancangan Perubahan APBD;
3. penyusunan pedoman dan petunjuk teknis APBD;
4. pengendalian penyusunan anggaran dan;
5. pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

### Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Bidang Akuntansi

Bidang Akuntansi dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan Fungsi akuntansi, pelaporan dan evaluasi terhadap transaksi keuangan bertanggungjawab kepada kepala Dinas. Untuk melaksanakan Fungsi Kepala Bidang mempunyai fungsi :

1. pelaksanaan penyusunan program kerja Bidang Akuntansi untuk acuan pelaksanaan fungsi;
2. pelaksanaan bina dan fasilitasi akuntansi, pelaporan dan evaluasi;
3. pelaksanan penyiapan bahan penyusunan Pedoman Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah;
4. pelaksanaan evaluasi atas realisasi APBD;
5. pelaksanaan penyusunan konsep Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD);
6. pelaksanaan penyusunan konsep rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan konsep rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD;
7. pelaksanaan fasilitasi akuntansi Perangkat Daerah;
8. pelaksanaan penyusunan laporan hasil kegiatan pelaksanaan tugas; dan
9. pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

### Tugas Pokok dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis Badan (UPT)

Unit Pelaksanaan Tehnis Badan mempunyai tugas menyelenggarakan sebagai tugas tehnis operasional Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD). Dalam melaksanakan tugas dimaksud Unit Pelaksanaan Tehnis Badan mempunyai tugas:

1. menyiapkan bahan pelaksanaan penyusunan rencana anggaran secara keseluruhan UPT;
2. melaksanakan Pendataan pajak restoran, pajak hotel, pajak hiburan, pajak air tanah, pajak MBLB, pajak parkir dan pajak reklame;
3. melaksanakan penagihan pajak restoran, pajak hotel, pajak hiburan, pajak air tanah, pajak MBLB, pajak parkir dan pajak reklame, Pajak Penerangan jalan non PLN;
4. menyiapkan bahan pendistribusian SPPT-PBB P2 ketetapan diatas 500 ribu dan SPTPD/Nota perhitungan pajak daerah lainnya;
5. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Badan.

Adapun Struktur Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Pasuruan sebagimana Peraturan Bupati Pasuruan Nomor Tahun 188 tahun 2021 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja badan pengelolaan keuangan dan pendapatan daerah kabupaten pasuruan dapat dilihat pada bagan dibawah ini:

Dengan terbitnya Permendagri Nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah dan Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 050-3708 tahun 2020 dan Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah dan Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 050-3708 tahun 2021 tentang hasil Verifikasi dan Validasi pemutakhiranKlasifikasi dan Nomenklatur perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah. maka tugas dan fungsi Program, kegiatan maupun sub Kegiatan indikator mengalami Perubahan.

SUSUNAN ORGANISASI BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN PASURUAN

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH

**SEKRETARIAT**

JABATAN FUNGSIONAL

SUB KOORDINATOR DAN KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL FUNGSIONAL

SUBBAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN

**BIDANG PENGENDALIAAN PENAGIHAN & PENGEMBANGAN**

**BIDANG PENDATAAN, PENETAPAN DAN PELAPORAN**

**BIDANG ASET**

**BIDANG ANGGARAN DAN BELANJA**

**BIDANG AKUNTASI**

#### SUBBIDANG

**PENDAFT & PENDAPATAN**

**SUBBIDANG**

**PENGENDALIAN PENDAPATAN**

**SUBBIDANG**

**BINA DAN FASILITASI AKUNTANSI**

**SUBBIDANG**

**ANGGARAN**

**SUBBIDANG**

**PENATAUSAHAAN BMD**

**SUBBIDANG**

**PERBENDAHARAAN**

**SUBBIDANG**

**PENAGIHAN & KEBERATAN**

**SUBBIDANG**

**PERENCANAAN PENGGUNAAN & PEMANFAATAN**

**SUBBIDANG**

**PERHITUNGAN & PENETAPAN**

##### SUBBIDANG

**PELAPORAN**

**SUB KOORDINATOR DAN KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL**

**SUB KOORDINATOR DAN KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL**

**SUB KOORDINATOR DAN KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL**

**SUB KOORDINATOR DAN KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL**

**SUB KOORDINATOR DAN KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL**

**FUNGSIONAL**

**FUNGSIONAL**

**UPT** Pelayanan Pajak Daerah **WIL.I I**

**UPT** Pelayanan Pajak Daerah **WIL.I**

**UNIT PELAKSANAAN TEHNIS BADAN (UPTB)**

## 2.2 Sumber Daya Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Dearah

Pelaksanaan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan harus dilaksanakan secara professional, efektif dan efesien, sehingga perlu didukung dengan sumber daya yang memadai. Sumber daya merupakan faktor penunjang dalam melaksanakan fungsi pengawasan, baik berupa sumber daya manusia, asset/modal, unit usaha yang masih beroperasional maupun sarana dan prasarana. Permasalahan dan tuntutan masyarakat yang semakin kompleks serta ditetapkannya berbagai regulasi oleh Pemerintah, maka diperlukan adanya sumber daya manusia yang memadai, cerdas, berkualitas dan profesional dalam merealisasikan tujuan, sasaran dan program yang ada pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Pasuruan

### Kondisi Kepegawaian Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Pasuruan

Pelaksanaan Penyelenggaraan kegiatan pemerintahan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Pasuruan sesuai struktur organisasi terdiri dari 5 (lima) bidang. Adapun Sumber daya Manusia yang dimiliki oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Pasuruan sebanyak 90 Orang, yang terdiri dari:

**Tabel 2.1 Kondisi Sumber Daya Aparatur Badan Pegelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2021**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Jumlah Pegawai Berdasarkan | | | | | | | | | | | | |
| Jenis kelamin | | Golongan | | | | Esselon | | | Pendidikan | | | |
| L | P | I | II | III | IV | 2 | 3 | 4 | SLTA | D3 | S1 | S2 |
|  |  |  |  |  |  | 1 | 6 | 20 | 25 | 7 | 36 | 23 |

Di samping Kondisi Sumber daya Aparatur BPKPD yang tersedia sekarang ini, BPKPD masih membutuhkan Tenaga Harian Lepas yang berjumlah 29 Orang, guna untuk mendukung kinerja Sasaran organisasi tersebut.

### Kondisi Sarana Prasarana Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Pasuruan

Sementara itu, untuk prasarana dan perlengkapan yang dimiliki oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Pasuruan sebagai peralatan pendukung tugas fungsi organisasi adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2 Jumlah Asset yang dimiliki dan jumlah asset yang tidak dipakai (Rp)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No. | Nama Barang | Jumlah asset yang dimiliki (RP) | | Keterangan | Jumlah Aset Yang Tidak Terpakai (RP) | | Keterangan |
| Unit | Rp. | Unit | Rp. |
| 1 | Kendaraan roda 4 (empat ) | 18 | 2.806.647.670 | - | 0 | 0 | - |
| 2 | Kendaraan roda 2 (dua) sebanyak | 58 | 778.915.500 | - | 7 | 46.900.000 | Dalam Proses evaluasi Penghapusan |
| 3 | Komputer | 94 | 1.529.356.480 | - | - | - | - |
| 4 | Laptop | 104 | 1.574.268.314 | - | - | - | - |
| 5 | Mesin lainnya/ porforasi | 4 | 73.000.000 | - | - | - | - |

## Kinerja Pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Pasuruan

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Pasuruan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 maka Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah telah menentukan arah kebijakan yang dituangkan dalam Penetapan Kinerja yang dilaksanakan oleh Sekertariat dan Bidang-bidang dengan dukungan dana yang tersedia dalam program dan kegiatan. Adapun capaian kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.3 Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Pasuruan

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **NO** | **Target NSPK** | **Target IKK** | **Target Indikator Lainnya** | **Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-** | | | **Realisasi Capaian Tahun ke-** | | | **Rasio Capaian pada Tahun ke-** | | |
| **2021** | **2022** | **2023** | **2021** | **2022** | **2023** | **2021** | **2022** | **2023** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** |
| 1 | PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH | 2% | 2% | 2% | 2.5% | 3% | 2.12% |  |  | 2.12% |  |  |
| 2 | PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH | 86% | 86% | 86% |  |  | 86% |  |  | 86% |  |  |
| 3 | PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH | 100% | 100% | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  |
| 4 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 100% | 100% | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  |

Capaian Kinerja Berdasarkan Sasaran dan tujuan dan sasaran Tahun 2021

Tujuan : Meningkatnya Birokrasi yang bersih dan akuntabel

Indikator Tujuan : Opini BPK, Satuan WTP

Sasaran : 1. Meningkatnya Tata Kelola Keuangan dan Aset Daerah

Indikator Sasaran : Laporan Keuangan dengan opini WTP,Satuan laporan

Sasaran : 2. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Indikator Sasaran : Nilai Sakip OPD Satuan Nilai

Dari Capaian diatas untuk indicator sasaran pertama yaitu Meningkatnya tata kelola Keuangan dengan opini BPK yang terdiri dari 2 laporan yaitu laporan AnAudit dan laporan Audit dengan formulasi bahwa Jenis opini BPK terhadap hasil laporan keuangan Daerah (Opini WTP), Hal ini telah di dukung oleh bebarapa program

1. Program Pengelolaan Keuangan Daerah dengan Indikator Persentase Penyusunan APBD dan laporan keuangan tepat waktu sesuai ketentuan,dengan target 100% yang terealisasi 100 %.

* Yang telah di dukung oleh beberapa kegiatan :
  1. Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah dengan indicator Persentase penyelesaian dokumen anggaran daerah tepat waktu target 100% dengan capaian 100%
  2. Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah target IKM/ SKM Layanan Perbendaharaan Daerah target 85% dan capaian 100%
  3. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah target 100% dan capain 100%
  4. Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah target 100% dan capain 100%

1. Program pengelolaan barang milik daerah dengan indicator Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah yang sesuai standar,dengan target 86 % dan capaian 100%

* Yang telah di dukung oleh beberapa kegiatan :
  + - 1. Pengelolaan Barang Milik Daerah dengan indicator Persentase penyusunan Dokumen dan Laporan Barang Milik Daerah yang sesuai standar target 100% dan capaian 100%

1. Program pengelolaan pendapatan daerah dengan indicator Persentase Peningkatan Pendapatan Daerah dengan indicator Persentase Peningkatan Pendapatan Daerah, dengan target 2% dan capaian 2.12 % bahwa tata kelola keuangan serta pelaporan keuangan disajikan sesuai dengan standar akuntasi pemerintah yang baik dengan wajar tanpa pengecualian dengan apa yang telah direncanakan dan dipertanggungjawabannya. Penggunaan system keuangan dengan system online dalam bidang Perencanaan, pengelolaan,penatausahaan dan pelaporan keuangan harus terus ditingkatkan sebagai upaya untuk mewujudkan akuntabilitas dan transparansi. Peran serta SKPD dalam menyusun Laporan Keuangan yang meliputi Neraca, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas serta Catatan atas Laporan Keuangan. Kesemua laporan tersebut harus disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) berbasis akrual sebagaimana dipersyaratkan oleh PP No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah yang dinyatakan dalam bentuk Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)., Laporan Keuangan SKPD juga digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan dan belanja dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, dan untuk menilai kinerja SKPD, serta membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

Sasaran yang kedua adalah Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dengan Indikator Sasaran Nilai Sakip OPD Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada pokoknya adalah instrumen yang digunakan instansi pemerintah dalam memenuhi kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi, terdiri dari berbagai komponen yang merupakan satu kesatuan, yaitu perencanaan strategis, perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, dan pelaporan kinerja. Permasalahan yang melanda organisasi pemerintah saat ini yaitu adanya pemikiran Organisasi pemerintah bahwa ukuran keberhasilan dan kegagalan dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya hanya bertumpu pada kemampuan instansi dalam menyerap anggaran yang dialokasikan, yakni keberhasilan instansi hanya ditekankan pada aspek input tanpa melihat tingkat output maupun dampaknya yang kemungkinan masih jauh dari standar . Padahal untuk dapat mengetahui keberhasilan maupun kegagalan organisasi seluruh aktivitas organisasi harus dapat diukur dan indikator pengukuran tidak hanya berdasarkan input tetapi juga berdasarkan kepada keluaran atau manfaat dari suatu program/kegiatan.

**Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keberhasilan Capaian Kinerja**

Laporan Keuangan dengan opini WTP

* + 1. Adanya perbaikansistem kerja dan sarana serta prasarana yang mendukung pencapaian target kinerja instansi.
    2. Adanya peningkatan kapasitas sumber daya aparatur baik melalui pembinaan dan pelatihan internal ataupun melalui peningkatan jenjang pendidikan.
    3. Semakin meningkatnya koordinasi antar SKPD dalam pelaksanaan tugas dan fungsi.
    4. Semakin meningkatnya koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Propinsi serta instansi vertikal lainnya.
    5. Peningkatan Koordinasi Rekonsiliasi antar Perangkat Daerah.

**Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keberhasilan Capaian Kinerja**

* + 1. Adanya Sosialisasi dan Koordinasi secara Intens.
    2. Adanya Evaluasi pengukuran Kinerja dan anggaran secara berkala.
    3. Menyeleraskan, Menyusun dan Mengevaluasi Dokumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran.
    4. Mengevaluasi pelaporan Kinerja secara berkala.
    5. Mengevaluasi capaian Kinerja secara berkala.

**Faktor-Faktor Yang Menghambat Pajak Daerah**

1. Data Wajib Pajak tidak akurat.
2. Besaran pajak lama tidak disesuaikan.
3. Wajib pajak Tidak Patuh.
4. Peralatan kurang canggih.
5. SDM kurang memadai.
6. Sistem Denda tidak jalan.
7. Kurangnya Koordinasi dan sarana Prasarana yang kurang memadai.

Tabel 2.4 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Pasuruan

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Uraian\*\*)** | **Anggaran pada Tahun ke** | | | **Realisasi Anggaran pada Tahun ke** | | | | **Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke** | | | | **Rata-rata Pertumbuhan** | | |
| **2021** | **2022** | **2023** | **2021** | **2022** | **2023** | **2021** | | **2022** | **2023** | **Anggaran** | | **Realisasi** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | | **9** | **10** | **11** | | **12** |
| PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 111.458.246.827,00 | **129.383.000.000** | **129.383.000.000** | 104.098.488.474,00 |  |  | 104.098.488.474,00 | | **129.383.000.000** | **129.383.000.000** | 17.924.753.173 | |  |
| PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH | 685.043.623.408,00 | **738.232.926.323** | **738.232.926.323** | 674.999.025.058,00 |  |  | 674.999.025.058,00 | | **738.232.926.323** | **738.232.926.323** | 53.189.302.915 | |  |
| PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH | 1.914.392.198 | **1.391.000.000** | **1.391.000.000** | 1.874.221.779 |  |  | 1.874.221.779 | | **1.391.000.000** | **1.391.000.000** | 523.392.198 | |  |
| PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH | 5.942.699.574 | **5.340.000.000** | **5.340.000.000** | 5.748.050.614 |  |  | 5.748.050.614 | | **5.340.000.000** | **5.340.000.000** | 602.699.574 | |  |
| **Jumlah** | 804.358.962.007.00 | 874.346.926.323.300 | 874.346.926.323.300 | 786.719.785.925 |  |  | 786.719.785.925 | | 874.346.926.323.300 | 874.346.926.323.300 |  | |  |

Realisasi Anggaran dan Realisasi Kinerja Badan Keuangan Daerah.

Telah di Ketahui dari Tabel tersebut bahwa Program Anggaran yang mendukung kinerja Badan Keuangan Daerah telah mencapai 97.81%, hal ini di sebabkan Efektifas dan Efesiensi Anggaran telah berhasil dicapai Badan Keuangan daerah, Keberhasilan anggaran tersebut seiring dengan Kinerja Pelayanan di Badan keuangan Daerah dengan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang telah banyak mencapai 100%., namun ada beberapa Sub Kegiatan yang belum mencapai seperti pada sub kegiatan di Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah

dan Retribusi Daerah, Hal ini di sebabkan Adanya pembatasan Kegiatan yang di sebabakan Covid 19, sehingga ada beberapa Retribusi yang menurun seperti Retribusi Jasa Usaha dan Retribusi Perizinan tertentu.

Kemudian Pada Sub Kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah mengalami Penuruan pada penerbitan sertfikat yang ditargetkan sebanyak 30 % terealisasi sebesar 11% Hal ini disebabakan Banyak tanah yg belum di identifikasi ,asal usul, riwayat. Sebagai tindak lanjutnya adalah Perlu Peningkatan Koordinasi dengan Pihak BPN dan Perangkat Terkait.

**Permasalahan dan Upaya Penyelesaian**

1. Sub Kegiatan Pengamanan BMD tidak dapat terealisasikan karena foktor kurangnya sumberdaya Manusia, Kurang nya anggaran serta Proses Kurangnya koordinasi Percepatan proses pensertifikatan di BPN.
2. Sub kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam Upaya pencapaian nya sehingga dapat mencapai target dengan cara meningkatkan Koordinasi kepada dinas Penghasil

## **2.4 Tantangan Dan Peluang Pengembangan Pelayanan** Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah

Untuk menganalisi kondisi lingkungan internal dan ekternal yang mempengaruhi target dan capaian kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah dapat menggunakan analisis metode SWOT. Dimana tantangan dan peluang Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah dalam mencapai target yang telah ditentukan adalah sebagai berikut:

1. Faktor Interal
   * 1. Kekuatan
2. Badan pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah adalah OPD yang memiliki kewenangan sebagai SKPKD;
3. Komitmen kepala Badan yang kuat untuk pembenahan manajemen Badan pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah;
4. Integritas dan loyalitas pegawai Badan pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah yang kuat untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi yang diembannya;
5. Tersedianya Anggaran yang mencukupi;
6. Tersedianya sarana prasarana kerja yang memadai;
7. Adanya Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati yang mendasari PKD Pengelolaan Aset, Pengelolaan Pendapatan dan Akuntansi;
8. Adanya Aplikasi Komputer dalam PKD, Pengelolaan Aset, Pengelolaan Pendapatan dan Akuntansi.
   * 1. Kelemahan
9. Kewenangan yang terlalu luas;
10. Rendahnya proporsi belanja langsung;
11. Penyerapan anggaran rendah di Semester I;
12. Kurangnya SDM yang memahami akuntansi;
13. Masih kurangnya kesadaran Wajib Pajak;
14. Penerimaan Pendapatan Daerah yang sering berfluktuasi.
15. Faktor Eksternal
    1. Peluang
16. Adanya otonomi daerah dalam Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Berkembangnya Peraturan Perundang – undangan Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Adanya Sistem Akuntansi dalam Pengelolaan Keuangan Daerah;
19. Adanya Pendampingan dalam Pengelolaan Keuangan Daerah;
20. Adanya potensi untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.
    1. Tantangan
21. Adanya tuntutan Akuntabilitas dalam Pengelolaan Keuangan Daerah;
22. Adanya tuntutan Transparansi dalam Pengelolaan Keuangan Daerah;
23. Adanya tuntutan Opini Wajar Tanpa Pengecualian dalam Pengelolaan Keuangan Daerah;
24. Meningkatnya Standar Audit Pengelolaan Keuangan Daerah;
25. Adanya E-Audit dalam Pengelolaan Keuangan Daerah;
26. Peraturan – peraturan yang sering berubah – ubah.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

* 1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah memiliki tugas dan fungsi yang tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 8 Tahun 2021 tentang tentang perubahan kedua atas peraturan daerah nomor 16 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah, maka Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Pasuruan mengampu tanggung jawab dalam melaksanakan tugas membantu Kepala Daerah menyelenggarakan pembangunan di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Pasuruan membantu Bupati untuk mengemban kewenangan di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah. Sebagaimana tugas dan kewenangan tersebut, Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Pasuruan memiliki fungsi untuk menyelenggarakan pembangunan di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Pasuruan di tengah upaya menjalankan tugas dan fungsinya. Permasalahan ini telah teridentifikasi sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah. Adapun pemetaan permasalahan pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Pasuruan dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.1 Pemetaan Permasalahan Pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Pasuruan

| No. | Masalah | Akar Masalah |
| --- | --- | --- |
| 1 | Masih terbatasnya tenaga teknis dibidang Pemeriksaan dan Penyidik Pajak Daerah, Juru Sita dan tenaga penyuluhan Pajak dan Retribusi Daerah | Masih terbatasnya tenaga teknis dibidang Pemeriksaan dan Penyidik Pajak Daerah, Juru Sita dan tenaga penyuluhan Pajak dan Retribusi Daerah. |
| 2 | Belum sempurnanya Sistim dan Prosedur Pelayanan pemungutan Penerimaan Daerah | Distribusi dan manajemen operasional dan pengembangan layanan berbasis teknologi informasi belum dilakukan secara terstruktur |
| 3 | Dari sektor Dana Perimbangan adanya pengaruh pandemi Covid yang mempengaruhi perekonomian global dengan berdampak kepada Sektor-Sektor yang terkait pada Penerimaan Daerah maupun Masayarakat maupun juga mempengaruhi penerimaan negara, selanjutnya akan berdampak kepada kebijakan pemerintah pusat dalam pengalokasian dana perimbangan ke propinsi dan kabupaten/kota seluruh Indonesia termasuk Kabupaten Pasuruan, baik dari bagi hasil pajak, bagi hasil bukan pajak, Dana Alokasi Umum (DAU), maupun Dana Alokasi Khusus (DAK). | Dari sektor Dana Perimbangan adanya pengaruh perekonomian global yang berdampak kepada nilai tukar rupiah maupun harga minyak juga mempengaruhi penerimaan negara, selanjutnya akan berdampak kepada kebijakan pemerintah pusat dalam pengalokasian dana perimbangan ke propinsi dan kabupaten/kota seluruh Indonesia termasuk Kabupaten Pasuruan, baik dari bagi hasil pajak, bagi hasil bukan pajak, Dana Alokasi Umum (DAU), maupun Dana Alokasi Khusus (DAK). |
| 4 | Masih rendahnya kemampuan Aparatur Pemungut *(Fiscus)* dalam mendata, menghitung potensi dan menjabarkannya dalam bentuk data base Potensi yang dapat dipercaya/akurat dan dapat dijadikan pedoman dalam menentukan arah dan kebijakan dalam upaya meningkatkan penerimaan daerah | Masih rendahnya kemampuan Aparatur Pemungut *(Fiscus)* dalam mendata, menghitung potensi dan menjabarkannya dalam bentuk data base. |
| 5 | Kesadaran Wajib Pajak masih rendah dalam melaporkan jumlah Pajak yang sesuai dengan potensi yang ada | Kesadaran Wajib Pajak masih rendah dalam melaporkan jumlah Pajak yang sesuai dengan potensi yang ada. |
| 6 | Atribut asset barang kurang lengkap | Perangkat Daerah belum maksimal melaporakan Atribut asset barang dengan baik. |
| 7 | Aset tanah masih banyak yang belum bersertifikat | Aset tanah masih banyak yang belum bersertifikat. |
| 8 | Aset Tanah belum terpetakan | Rendahnya tata tertib administrasi aset |
| 9 | Proses pengelolaan keuangan masih terkendala oleh Sistem informasi dan Tekhnologi  (e-Budgeting) | Sistem informasi dan Tekhnologi (e-Budgeting) terkendala terkait regulasi yang baru dan Pembakuan Nomenklatur Program Kegiatan dan Sub Kegiatan yang ada di SKPD, sehingga Perangkat Daerah Mudah Menggeser anggaran. |
| 10 | Pertumbuhan Keungan Daerah pada saat ini di pengaruh oleh Pandemi Covid 19 baik pada Ekternal mapun Internal, sehingga Manajemen pengelolaan Keuangan Daerah perlu diperhatikan secara efektif, Efesien dan Tepat, dalam Program dan kegiatan yang tentunya berdampak pada aspek ekonomi yang Memperhatikan Peraturan-Peraturan dan kebijakan dari Pemerintah dalam pelaksanaan tugas, serta perlu Inovasi pada Program Kegiatan, Inovasi Program kegiatan perlu di tingkatkan untuk merealisaasikan Program dan kegiatan tersebut | Pandemi Covid 19 |
| 12 | Penyertaan Modal masih belum maksimal. | Kurangnya dana penyertaan Modal Daerah. |
| 13 | Penerimaan dari Pajak Daerah belum optimal. | Penetapan tariff pajak daerah dibawah batas maksimal yang diperkenankan oleh undang-undang |
| 14 | Banyak nya peraturan dari Pusat terkait Covid 19 sehingga banyak pergeseran anggaran sebelum perubahan Anggaran. | Peraturan Covid 19 terkait Refocusing anggaran |

## 3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi dan misi Kabupaten Pasuruan mencerminkan visi dan misi pasangan Bupati dan Wakil Bupati Terpilih. Cita-cita pembangunan Kabupaten Pasuruan yang termaktub dalam RPJMD Kabupaten Pasuruan Tahun 2018-2023 yaitu:

“Menuju Kabupaten Pasuruan yang sejahtera, maslahat dan Berdaya Saing”

Visi dan pokok-pokok visi di atas menjadi dasar perumusan Misi RPJMD Kabupaten Pasuruan tahun 2018-2023 yang terdiri dari

|  |  |
| --- | --- |
| Misi 1 : | Meningkatkan kualitas dan produktifitas sektor produksi dan produk-produk unggulan Kabupaten Pasuruan melalui penguatan kelembagaan dan meningkatkan nilai tambah ekonomi desa berbasis masyarakat dengan cara mempermudah aspek legal dan pembiayaan dalam rangka percepatan pembangunan daerah menuju kesejahteraan masyarakat; |
| Misi 2 : | Melaksanakan pembangunan berbasis keluarga dengan memanfaatkan modal berbasis religiusitas dan budaya, guna mewujudkan kohesi; |
| Misi 3 : | Meningkatkan kualitas infrastruktur daerah untuk penguatan konektivitas dan aksesibilitas masyarakat dalam rangka peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan pemanfaatan segenap potensi sumber daya alam secara bertanggungjawab dan berkelanjutan sebagai bentuk konservasi lingkungan di Kabupaten Pasuruan; |
| Misi 4 : | Memperkuat dan memperluas reformasi birokrasi yang mendukung tata kelola pemerintahan dan pelayanan yang inovatif, bersih, efektif, akuntabel, dan demokratis yang berbasis pada teknologi informasi |
| Misi 5 : | Meningkatkan pelayanan dasar terutama pelayanan kesehatan, permukiman dan pendidikan dengan mengintegrasikan pendidikan formal dan nonformal sebagai wujud afirmasi pendidikan karakter di Kabupaten Pasuruan. |

BPKPD Kabupaten Pasuruan memiliki keterkaitan dengan Misi ke 4 Tujuan dan Sasaran dari RPJMD Kabupaten Pasuruan Tahun 2018-2023. BPKPD Kabupaten Pasuruan berperan untuk meningkatkan birokrasi yang bersih dan akuntabel. Oleh karena itu, BPKPD Kabupaten Pasuruan perlu mengidentifikasi penghambat dan pendorong pelayanan terhadap pencapaian Visi dan Misi tersebut sebagaimana tertera pada di bawah ini.

Tabel 3.2 Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah terhadap pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Pasuruan

| **No** | **Program BPKPD Kabupaten Pasuruan** | **Permasalahan** | **Faktor pendukung** | **Faktor penghambat** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Program Pengelolaan Pajak Daerah | Penerimaan dari tariff Pajak Daerah belum optimal | Penetapan Tata kelola, SOP dan dukungan regulasi | Penetapan ariff pajak daerah dibawah batas maksimal yang diperkenankan oleh undang-undang |
|  |  | Masih terbatasnya tenaga teknis dibidang Pemeriksaan dan Penyidik Pajak Daerah, Juru Sita dan tenaga penyuluhan Pajak dan Retribusi Daerah | Peningkatan SDM melalui Bimtek-Bimtek | Masih rendahnya kemampuan Aparatur Pemungut *(Fiscus)* dalam mendata, menghitung potensi dan menjabarkannya dalam bentuk data base. |
|  |  | Pengembangan pelayanan pajak daerah berbasis teknologi informasi belum optimal | Dukungan dari stakeholders untuk selalu melakukan pengembangan Inovasi-inovasi baru | Distribusi dan manajemen operasional dan pengembangan layanan berbasis teknologi informasi belum dilakukan secara terstruktur |
|  |  | Kesadaran Wajib Pajak masih rendah dalam melaporkan jumlah Pajak yang sesuai dengan potensi yang ada. | Mengadakan Sosialisasi – penyebaluasan pajak Daerah | Kesadaran Wajib Pajak masih rendah dalam melaporkan jumlah Pajak yang sesuai dengan potensi yang ada. |
| 2 | Pengelolaan Pendapatan Daerah dalam Pengelolaan Retribusi Daerah, Bagi Hasil dan Lain-Lain PAD yang sah . | Penerimaan RJU yang cenderung stagnan | Jumlah Aset daerah yang cukup banyak dan potensi untuk ekstensifikasi pendapatan masih terbuka lebar | Perlu peningkatan sosialisasi dan  Koordinasi dengan Bidang terkait |
| 3 | Operasional Pemungutan & Pelayanan Pajak Daerah, Retribusi Daerah di setiap UPT BPKPD | Sebagai ujung tombak pelaksanaan pemungutan PAD dan sosialisasi kebijakan perpajakan kepada masyarakat | Komunikasi dan koordinasi dengan pemerintah daerah dan institusi terkait terbangun baik | Perbandingan luas wilayah dan medan operasional dengan sarpras penunjang masih belum memadai |
| 4 | Program Pelayanan Kesekretariatan BPKPD | Nilai SAKIP Perangkat Daerah | Pemenuhan Bimtek-Sosialiasai SAKIP | Kurangnya Antusias Terhadap SAKIP |
| 5 | Program Pengelolaan Barang Milik Daerah | Atribut asset barang kurang lengkap | Koordinasi Rapat-rapat terkait dengan OPD | Perangkat Daerah belum maksimal melaporakan Atribut asset barang dengan baik. |
|  |  | Aset tanah masih banyak yang belum bersertifikat | MOU dengan BPN | Peningkatan Koordinasi dengan PIhak BPD dan OPD terkait |
|  |  |  | Membentuk tim teknis antara bpn dengan pemda (bkd, opd pengampuh, camat, kades, kakel yang ada asetnya PEMDA). |  |
| 6 | Program Pengelolaan Keuangan daerah | Proses pengelolaan keuangan masih terkendala oleh Sistem informasi dan Tekhnologi  (e-Budgeting) yang belum terintegrasi dengan Penatausahaan dan Pelaporan Pengelolaan Keuangan | Aplikasi SIPD sudah dilakasanakan namun terpisah dengan Aplikasi Penatausahaan SIMDA | Masih Belum ada Kesiapan dari pusat dan tindaklanjut Dari Pusat |
|  |  | Penyertaan Modal masih belum maksimal. | Pendampingan Investasi | Kurangnya dana penyertaan Modal Daerah. |
|  |  | banyak nya peraturan dari Pusat terkait Covid 19 sehingga banyak pergeseran anggaran sebelum perubahan Anggaran. | Peningkatan Intens Konsolidasi dan Koordinasi dengan SKPD | mengakibatkan angka belanja berubah-rubah, pada perangkat Daerah yang harus menyesuiakan rekening belanja |

## 3.3 Telaahan Renstra Kementrian/Lembaga dan Renstra Provinsi

### 3.3.1 Telaahan Renstra Kementrian Lembaga

Tabel 3.3 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah Berdasarkan Sasaran K/L

| **Sasaran Renstra K/L** | **Permasalahan Perangkat Daerah terkait Sasaran Renstra K/L** | **Faktor** | |
| --- | --- | --- | --- |
| **Pendukung** | **Penghambat** |
| Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2020-2024 | Turunnya kinerja penerimaan pajak | Kebijakan pemerintah | Kondisi perekonomian global yang belum membaik dan sangat |
| Kebijakan kelembagaan | Adanya upaya peningkatan efektivitas rentang kendali, rentang pekerjaan dan beban kerja, serta rentang koordinasi | Adanya perubahan kondisi ekonomi, perkembangan teknologi, kebijakan politik |
|  | Kondisi geografis dan demograf |

### 3.3.2 Telaahan Renstra Provinsi

Tabel 3.4 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah Berdasarkan Sasaran Provinsi

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Sasaran Renstra Provinsi | Permasalahan Perangkat Daerah terkait Sasaran Renstra Provinsi | Faktor | |
| Pendukung | Penghambat |
| Renstra Bapenda Provinsi Jawa Timur tahun 2019-2024 | Perumusan dokumen potensi PAD belum optimal | Basis data base objek pajak dan data pendukung lainnya cukup lengkap | Tingkat akurasi data objek pajak yang digunakan sebagai basis perhitungan potensi belum optimal |
| Pertumbuhan ekonomi di proyeksikan meningkat dari tahun-tahun sebelumnya | Penetapan target PAD belum sepenuhnya memperhatikan fackor dayadorong daya beli masyarakat |
| Sistem pelaporan penerimaan PAD yang belum optimal | Setiap pegawai memiliki kinerja perorangan untuk menyampaikan surat perpajakan | Rendahnya kualitas pemutakhiran data status objek pajak |

## 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

### 3.4.1 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)

Telah tertuang pada Perda no 12 tahun 2010 rencana tata ruang wilayah ( RTRW ) kabupaten pasuruan tahun 2009 – 2029, Visi penataan ruang wilayah adalah terwujudnya penataan ruang wilayah yang mampu mendorong investasi produktif, lestari dan optimal secara berkeadilan bagi seluruh masyarakat. Tujuan penataan ruang di Kabupaten Pasuruan adalah “mewujudkan ruang wilayah yang mendukung perkembangan industri, pertanian dan pariwisata serta selaras dengan keberlanjutan lingkungan hidup dan pemerataan pembangunan”. Dengan demikian, dalam rangka penyelenggaraan pelayanan pemerintahan Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerahdalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi urusan keuangan, memiliki faktor pendorong dan penghambat pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah yang ditinjau dari implikasi RTRW dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.5 Faktor Pendorong dan PenghambaT Pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah ditinjau dari implikasi RTRW

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **No.** | **Telaah RTRW terkait Tupoksi** | **Faktor Pendorong** | **Faktor Penghambat** |
| 1. | Pemetaan Aset | Mengadakan Sosialisasi Peningkatan SDM tertib Administrasi BMD | Kurangnya Koordinasi dengan Pihak terkait |
|  |  | Peningkatan Kerjasama Dengan Pihat terkait |  |
|  |  | Peningkatan Rekonsiliasi BMD |  |
| 2 | Peningkatan PAD | Sosialisasi serta Inovasi-Inovasi Kegiatan  Pemutakhiran Data  Peningkatan Kerjasama terkait | Kurangnya Kesadaran Wajip Pajak  Kurangnya SDM Pemungut Pajak |

### 3.4.2 Telaah Kajian Lingkugan Hidup Starategis (KLHS)

Sebagaimana disebutkan dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH), lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup. Telaahan terhadap KLHS diperlukan untuk memastikan bahwa program dan kegiatan yang direncanakan telah mengintegrasikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Dengan demikian, faktor pendorong dan penghambat pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah Kabupaten Pasuruan ditinjau dari impikasi KLHS dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.6 Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah ditinjau dari implikasi KLHS

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| No. | Telaah KLHS terkait Tupoksi | Faktor Pendorong | Faktor Hambatan |
| 1. | Pemanfaatan tanah atau Perubahan asset berdampak pada yang mendukung keberlangsungan lingkungan | Sosialisasi tentang pemanfaatan tanah | Kurang nya pemetaan asset tanah |

## 3.5 Penentuan isu-isu strategis

Isu-isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau diprioritaskan dalam perencanaan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas di masa mendatang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu startegis adalah keadaan yang apabila tidak diatisipasi akan menimbulkan masalah/kerugian yang besar atau sebaliknya.

Setelah mempertimbangkan gambaran permasalahan dan faktor penghambat pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah Kabupaten Pasuruan dan berdasarkan hasil review terhadap visi dan misi kepala daerah serta Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, Isu strategis dalam ruang lingkup Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan SDM Pemungut Pajak;
2. Peningkatan Sosialisasi Wajib pajak
3. Melaksanakan Pengelolaan Asset Daerah secara optimal;
4. Melaksanakan tertib Administrasi Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peningkatan Koordinasi tentang Peraturan dan Kebijakan terbaru;
6. Melaksanakan Inovasi Program dan Kegiatan.

# BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

## 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

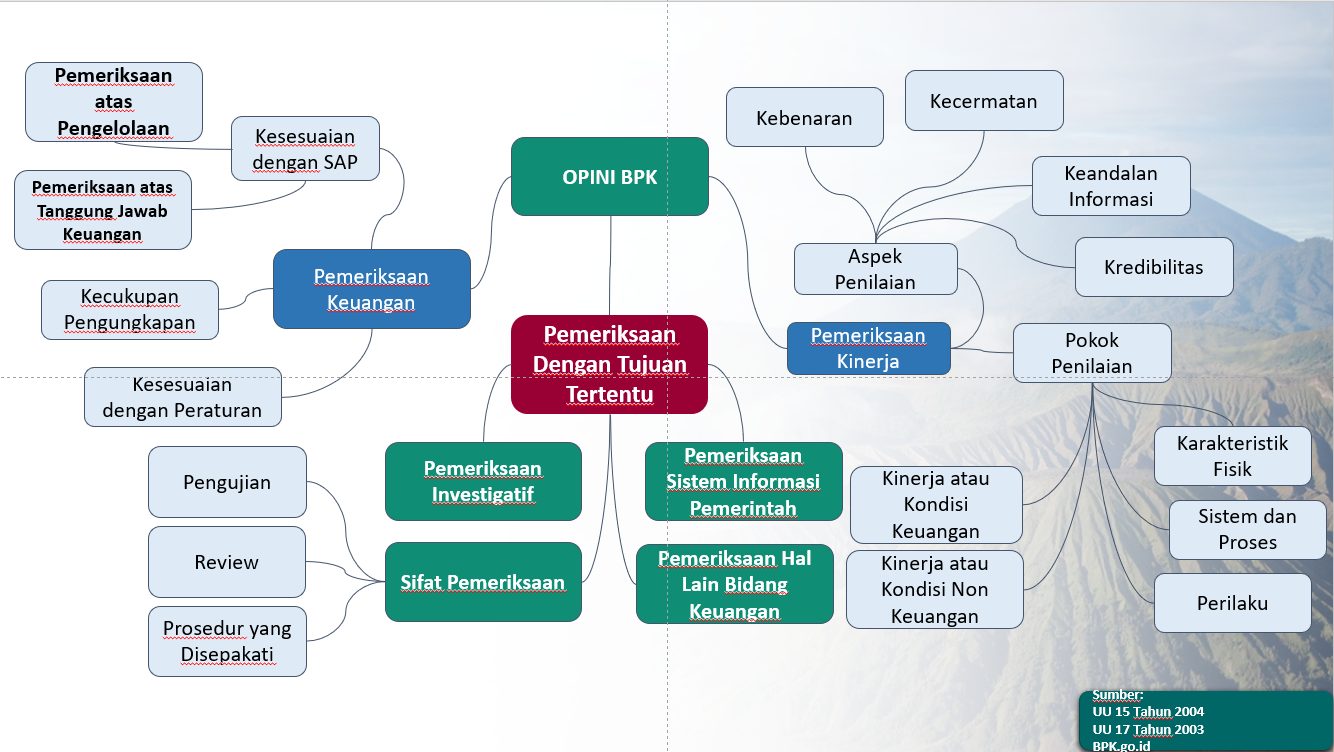
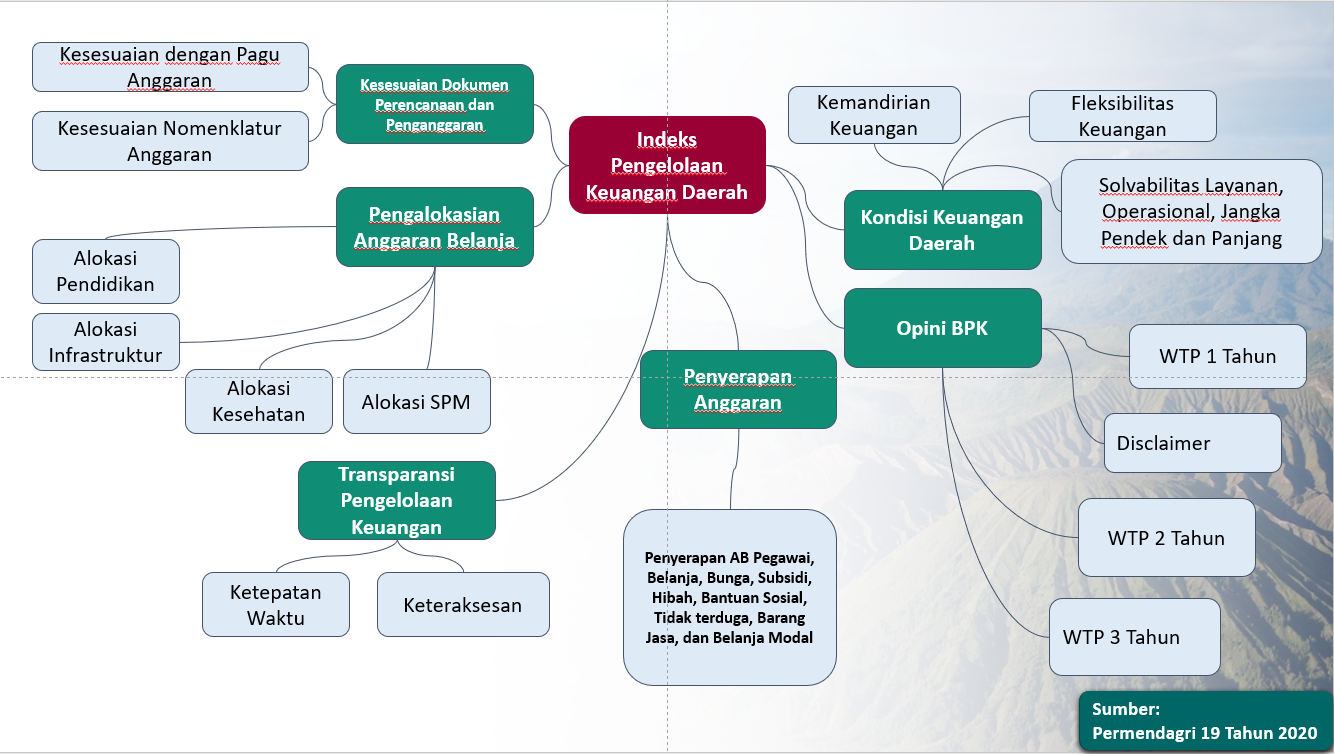
Tujuan dan sasaran merupakan penjabaran atau implementasi visi dan misi dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional untuk kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun ke depan. Oleh karena itu berdasarkan visi bupati Kabupaten Pasuruan yaitu **Menuju Kabupaten Pasuruan yang Sejahtera, Maslahat dan berdaya saing**,dengan Misi yang telah ditetapkan, Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah termasuk dalam Misi ke-4 yakni **Memperkuat dan memperluas reformasi birokrasi yang mendukung tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang inovatif, bersih, efektif, akuntabel, dan demokratis yang berbasis pada teknologi informasi.**

Visi dan misi Tahun 2018-2023 yang telah ditetapkan oleh Bupati Pasuruan dan diturunkan ke dalam tujuan dan sasaran pembangunan yang akan dicapai oleh Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah dalam waktu 5 (lima) tahun mendatang dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

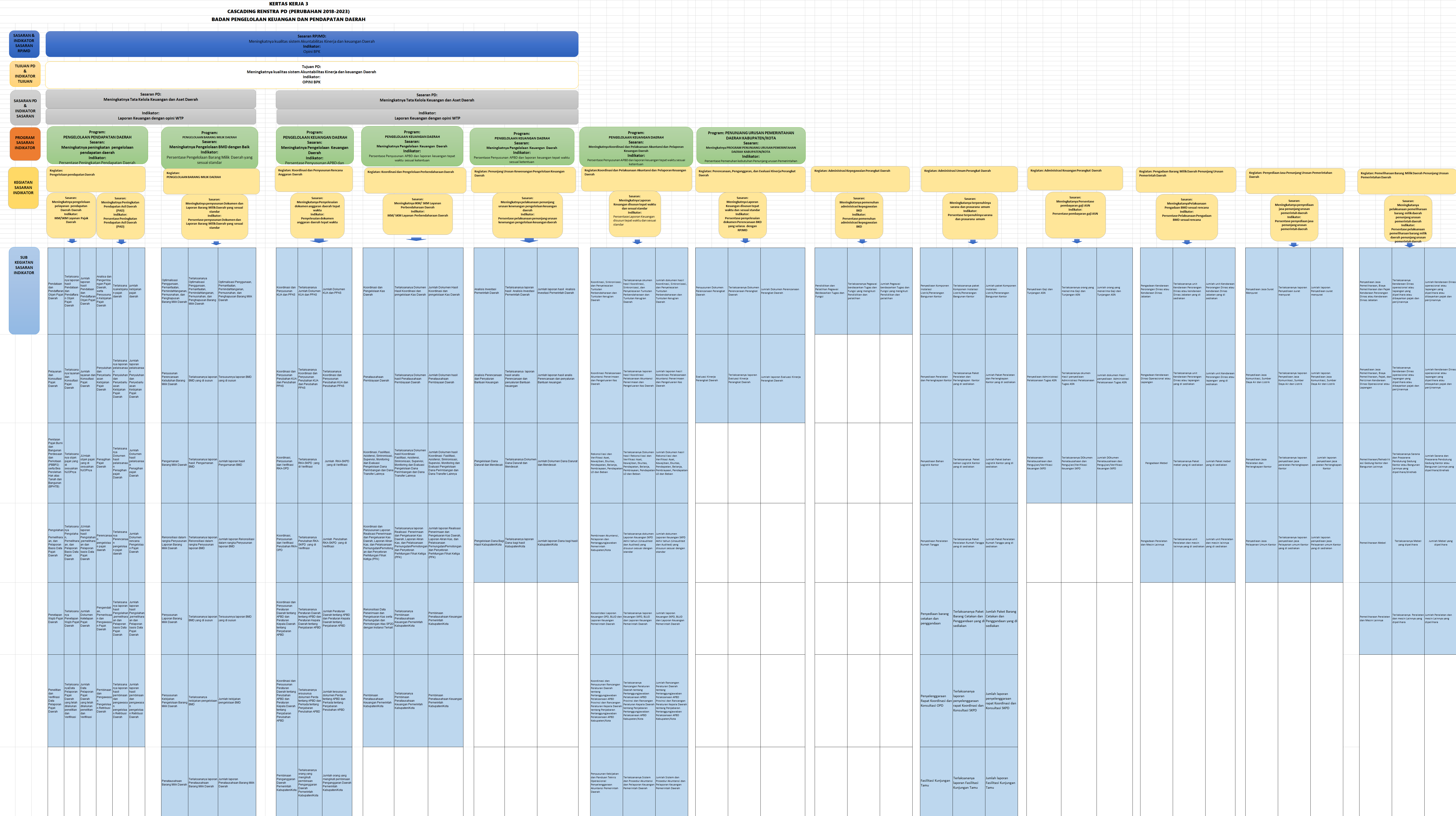
Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah Dinas/Badan/Kecamatan/Sekretariat

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **TUJUAN** | **INDIKATOR TUJUAN** | **SASARAN UTAMA** | | |  | **INDIKATOR SASARAN** |  | **TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-** | | | |
|  | |  | **2021** | **2022** | **2023** | **2023** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | | 5 | |  | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Meningkatnya kualitas sistem Akuntabilitas Kinerja dan keuangan Daerah | Opini BPK | Meningkatnya Tata Kelola Keuangan dan Aset Daerah | | | Laporan Keuangan dengan opini WTP | |  | 2 Laporan | 2 Laporan | 2 Laporan | 2 Laporan |
|  |  |  | Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah | | | Nilai Sakip Perangkat Daerah | |  | 80,5 | 80,8 | 81 | 82 |
|  |  | |  | |
|  |  | |  | |
|  | | | |  |
|  | | | |  |
|  | | | |  |

Gambar 4.1 *Logical Framework* Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah Kabupaten Pasuruan



Gambar 4.2 Cascading Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah Kabupaten Pasuruan



# BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Bab ini menghadirkan formulasi Strategi dan Arah Kebijakan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah selama 5 tahun ke depan dalam upaya mewujudkan tujuan dan sasaran jangka menengah Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2018-2023.

Strategi adalah pemilihan tindakan spesifik oleh pemerintah dalam suatu wilayah tertentu untuk menetapkan tujuan jangka panjang dan memetakan kendala yang dihadapi secara menyeluruh beserta pemecahannya. Strategi dapat pula diartikan sebagai pengaturan aksi untuk merealisasikan sebuah sasaran. Oleh karena strategi merepresentasikan pencapaian tujuan, maka strategi termuat di dalam penjabaran kebijakan dan program.

Arah kebijakan adalah serangkaian prioritas kerja pemerintah di suatu wilayah tertentu sebagai peta jalan menuju tujuan yang ingin dipenuhi. Perumusan arah kebijakan menyinergikan strategi dan pelaksanaan pembangunan agar saling berkesinambungan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Kebijakan menjadi pedoman pelaksanaan program maupun kegiatan guna menjamin keberlangsungdan dan keterpaduan pengejawantahan tujuan dan sasaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Pasuruan.

Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah memiliki tugas dan fungsi sesuai dengan yang tertuang pada dokumen Perubahan RPJMD Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pasuruan Tahun 2018-2023 sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini.

Tabel 5.1 Tujuan, Sasaran, Starategi dan Kebijakan

| VISI : Menuju Kabupaten Pasuruan yang Sejahtera, Maslahat dan berdaya saing | | | |
| --- | --- | --- | --- |
| MISI IV : Memperkuat dan memperluas reformasi birokrasi yang mendukung tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang inovatif, bersih, efektif, akuntabel, dan demokratis yang berbasis pada teknologi informasi | | | |
| Tujuan | Sasaran | Strategi | Arah Kebijakan |
| Meningkatnya kualitas sistem Akuntabilitas Kinerja dan keuangan Daerah | Meningkatnya Tata Kelola Keuangan dan Aset Daerah  Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah | Peningkatan Pelaksanan Fungsi Penganggaran | 1. Meningkatkan Pengelolaan Keuangan Daerah melalui pengembangan sistem informasi manajemen keuangan yang terintegrasi; 2. Meningkatkan penerimaan daerah melalui intensifikasi, ekstensifikasi; dan 3. Meningkatkan pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) daerah melalui pengembangan sistem informasi manajemen barang daerah  Meningkatkan Koordinasi, Sosialisasi internal BPKPD terhadap Peraturan dan kebijakan yang baru |
| Peningkatan Pelaksanaan Fungsi Perbendaharaan |
| Peningkatan Pelaksanan Fungsi Pengendalian Gaji |
| Peningkatan kualitas sistem dan prosedur akuntansi |
| Peningkatan kualitas laporan keuangan daerah |
| Peningkatan Pelaksanaan Penyusunan Raperda Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD |
| Peningkatan kualitas data Wajib Pajak |
| Peningkatan Sistem penetapan dan perhitungan pajak daerah |
| Peningkatan sistem pelaporan pendapatan daerah |
| Intensifikasi dan ekstensifikasi obyek-obyek pajak daerah |
| Evaluasi Perturan Daerah tentang Pajak Daerah |
| Peningkatan sosialisasi sistem dan prosedur pajak daerah |
| Peningkatan tertib administrasi Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) |
| Optimalisasi Penggunaan dan Pemanfaatan Barang Milik Daerah (BMD) |
| Peningkatan pengamanan Barang Milik Daerah (BMD) |
|  |  | Peningkatan Koordinasi serta pelayanan Internal di BPKPD |  |

* Inovasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah meliputi:

Lapak Santri : Lapor Pajak Secara Mandiri dengan Transaksi Non Tunai

* **Manfaat**

1. Memberikan kemudahan bagi Wajib Pajak untuk melakukan pelaporan pajak daerah secara mandiri dengan menggunakan gadget/ perangkat elektronik lainnya yang terhubung dengan sambungan internet;
2. Pelaporan dan pembayaran pajak secara mandiri dapat mengurangi interaksi Wajib Pajak dengan petugas. Hal ini merupakan salah satu bentuk komitmen BPKPD dalam upaya pencegahan penyebaran Covid-19;
3. Dapat meminimalisir keterlambatan pelaporan dan pembayaran pajak daerah karena wilayah administrasi Kabupaten Pasuruan yang cukup luas meliputi 24 kecamatan;
4. Dengan penerapan transaksi non tunai dapat meminimalisir resiko *human eror* dalam pencatatan data penerimaan pajak daerah, sehingga akan tercipta laporan pendapatan uang akuntabel.

* Peningkatan Keamanan, Ketertiban, dan Ketentraman Masyarakat serta Pelayanan Publik yang Berkualitas dan Didukung oleh Profesionalitas Sumber Daya Aparatur yang menjadi Prioritas pembangunan Pada tahun 2023, Hal ini perlu dukungan dari BPKPD yang artinya Bahwa Dukungan dalam bentuk Program dan Kegiatan maupun Sub Kegiatan. Untuk menyeleraskan Priopritas pembangunan dengan Rencana Kerja pada tahun 2023 yang bertemakan Pelayanan Berkualitas yang melibatkan BPKPD dengan sub tema Optimalisasi PAD, Program tersebut antara lain Program Pengelolaan Pendapatan Daerah dan Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah dengan Sub Kegiatan :
  1. Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah
  2. Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah
  3. Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
  4. Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah
  5. Penagihan Pajak Daerah
  6. Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah
  7. Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah

# BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Sebagaimana perwujudan dari strategi dan arah kebijakan untuk mencapai tujuan strategis, selanjutnya perlu menentukan tindakan operasional yang kemudian terkandung di dalam program dan kegiatan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Pasuruan. Program dan kegiatan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Pasuruan tentu relevan dengan mempertimbangkan dan memperhatikan tugas dan fungsi. Program adalah penjabaran langkah-langkah yang sistematis untuk mewujudkan kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan, yang mana dapat melibatkan beberapa instansi pemerintah secara terpadu untuk berkolaborasi merealisasikan sasaran. Sedangkan kegiatan merupakan penguraian lebih lanjut dari program.

Indikator kinerja merupakan ukuran keberhasilan yang digunakan untuk mengetahui gambaran terwujudnya kinerja serta pencapaian hasil *(outcome)* sebuah program dan hasil *(output)* kegiatan. Sehingga indikator kinerja berperan sebagai alat ukur sejauh mana pencapaian tujuan dan sasaran. Tabel di bawah ini memuat rencana program, kegiatan, kelompok sasaran, beserta pendanaan indikatif yang menjadi pedoman bagi Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Pasuruan.

Tabel 6.1 Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah Kabupaten Pasuruan

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tujuan** | **Sasaran** | **Kode** | **Program dan Kegiatan** | | | **Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)** | **Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan  (2018)** | **Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan** | | | | | | | | | | | | **Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab** | **Lokasi** |
| **2019** | | **2020** | | **2021** | | **2022** | | **2023** | | **Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah (2023)** | |
| **target** | **Rp** | **target** | **Rp** | **target** | **Rp** | **target** | **Rp** | **target** | **Rp** | **target** | **Rp** |  |  |
| **Terwujudkan Pengelolaan Keuangan Daerah yang Akuntabel dan Transparan yang berbasis Teknologi Informasi** | **Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah** |  |  |  |  | Nilai Sakip Perangkat Daerah |  | **74** |  | 76 |  | 80,5 |  | **81** |  | **82** |  | **WTP** |  |  |  |
| **Meningkatkanya tata kelola keuangan dan aset daerah** |  |  |  |  | Persentase laporan keuangan perangkat daerah sesuai standar akuntansi pemerintah |  | **100%** |  | **100%** |  | **100%** |  | **100%** |  | **100%** |  | **100%** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Jumlah Peningkatan Pendapatan Asli Daerah** |  | **643 M** |  | **672 M** |  | **674 M** |  | **696 M** |  | **721 M** |  | **721 M** |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tujuan** | **Sasaran** | **Kode** | **Program dan Kegiatan** | | **Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)** | **Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan  (2018)** | **Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan** | | | | | | | | | | | | **Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab** | **Lokasi** |
| **2019** | | **2020** | | **2021** | | **2022** | | **2023** | | **Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah (2023)** | |
| **target** | **Rp** | **target** | **Rp** | **target** | **Rp** | **target** | **Rp** | **target** | **Rp** | **target** | **Rp** |  |  |
|  |  |  | **PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN** | | **Persentase Pemenuhan Pelayanan Kantor** | **1.191.562.663** | **100%** | **1.497.076.663** | **100%** | **1.817.935.464** | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  |  | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah surat yang dikirim | 2.742.000 | 480 Surat | 3.000.000 | 480 Surat | 3.000.000 | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  |  | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Pembayaran tagihan Rekenig telp, listrik dan air | 180.506.940 | 312 Rek/bln | 320.000.000 | 312 Rek/bln | 380.000.000 | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  |  | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah pembelian peralatan dan perlengkapan kantor | 17.708.000 | 20 jenis | 37.552.750 | 20 jenis | 37.552.750 | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  |  | Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan | Jumlah pembayaran honor pengelola keuangan, pengelola aset, pelaku pengadaan barang/jasa | 205.645.000 | 340 org/bln | 215.605.000 | 340 org/bln | 215.605.000 | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  |  | Penyediaan Alat Tulis Kantor | Jumlah pembelian alat tulis kantor | 17.792.000 | 20 jenis | 30.000.000 | 20 jenis | 30.000.000 | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tujuan** | **Sasaran** | **Kode** | **Program dan Kegiatan** | | **Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)** | **Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan  (2018)** | **Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan** | | | | | | | | | | | | **Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab** | **Lokasi** |
| **2019** | | **2020** | | **2021** | | **2022** | | **2023** | | **Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah (2023)** | |
| **target** | **Rp** | **target** | **Rp** | **target** | **Rp** | **target** | **Rp** | **target** | **Rp** | **target** | **Rp** |
|  |  |  |  | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah barang cetakan dan pengadaan | 41.481.000 | 20 jenis | 50.000.000 | 20 jenis | 50.000.000 | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  |  | Penyediaan Makanan dan Minuman | Jumlah kegiatan rapat dan tamu | 102.351.160 | 810 kali | 128.500.000 | 810 kali | 128.500.000 | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  |  | Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah | Jumlah Laporan koordinasi & konsultasi | 418.488.913 | 200 Laporan | 414.018.913 | 200 Laporan | 414.018.913 | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  |  | Penyediaan Jasa Perkantoran | Jumlah Tenaga kontrak/THL yang menerima Pembayaran Honor | 204.847.650 | 53 org/bln | 298.400.000 | 53 org/bln | 298.400.000 | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  |  | Pengembangan Sumber Daya Aparatur | Jumlah peserta Bimtek | - | - | 0 | 2 orang | 35.000.000 | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tujuan** | **Sasaran** | **Kode** | **Program dan Kegiatan** | | **Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)** | **Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan  (2018)** | **Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan** | | | | | | | | | | | | **Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab** | **Lokasi** | |
| **2019** | | **2020** | | **2021** | | **2022** | | **2023** | | **Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah (2023)** | |
| **target** | **Rp** | **target** | **Rp** | **target** | **Rp** | **target** | **Rp** | **target** | **Rp** | **target** | **Rp** |
|  |  |  |  | Penyusunan Laporan kinerja dan keuangan | Jumlah laporan kinerja triwulan dan tahunan | - | - | 0 | 5 laporan | 100.000.000 | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  |  | Penyediaan Optimalisasi Fungsi PPKD | Jumlah Proposal Dana Bantuan | - | - | 0 | 12.500 proposal | 125.858.801 | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | **PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR** | | Persentase Sarana Prasarana dengan Kondisi Baik | **1.146.014.000** | **100%** | **544.000.000** | **100%** | **543.000.000** | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  |  | Pembangunan Gedung/Kantor | Jumlah gedung yang dibangun | **0** | - | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  |  | Pengadaan Kendaraan Dinas | Jumlah pengadaan kendaraan | **0** | - | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tujuan** | **Sasaran** | **Kode** | **Program dan Kegiatan** | | **Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)** | **Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan  (2018)** | **Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan** | | | | | | | | | | | | **Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab** | **Lokasi** |
| **2019** | | **2020** | | **2021** | | **2022** | | **2023** | | **Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah (2023)** | |
| **target** | **Rp** | **target** | **Rp** | **target** | **Rp** | **target** | **Rp** | **target** | **Rp** | **target** | **Rp** |
|  |  |  |  | Pengadaan Peralatan Gedung/Kantor | Jumlah Pengadaan Peralatan Kantor | 114.490.000 | - | 0 | 10 Jenis | 50.000.000 | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  |  | Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor | Jumlah gedung kantor yang dipelihara | 740.000.000 | 3 Tempat | 85.000.000 | 3 Tempat | 65.000.000 | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  |  | Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas/Operasional | Jumlah Kendaraan Dinas yang dipelihara | 224.838.000 | 335 kali | 364.000.000 | 336 kali | 328.000.000 | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  |  | Pemeliharaan Rutin/berkala Peralatan Kantor | Jumlah Peralatan Kantorcdipelihara | 66.686.000 | 525 kali | 95.000.000 | 527 kali | 100.000.000 | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tujuan** | **Sasaran** | **Kode** | **Program dan Kegiatan** | | **Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)** | **Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan  (2018)** | **Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan** | | | | | | | | | | | | **Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab** | **Lokasi** |
| **2019** | | **2020** | | **2021** | | **2022** | | **2023** | | **Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah (2023)** | |
| **target** | **Rp** | **target** | **Rp** | **target** | **Rp** | **target** | **Rp** | **target** | **Rp** | **target** | **Rp** |
|  |  |  | **PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH** | | Persentase ketepatan penetapan APBD | **12.842.632.660** | **Tepat** | **14.897.605.037** | **Tepat** | **3.482.722.000** | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  |  | Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD dan P-APBD | Jumlah Rancangan Perda tentang APBD,P-APBD dan Rperkada | 0 | - | 0 | 4 Peraturan | 2.228.162.000 | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  |  | Penatausahaan Pengelolaan Gaji PNS dan Non PNS | Jumlah PNS dan Non PNS yang dilayani | 0 | - | 0 | 127.692 org/bln | 820.730.000 | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  |  | Optimalisasi Fungsi BUD | Jumlah SP2D yang terbit | 0 | - | 0 | 28.000sp2d | 433.830.000 | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  |  | Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD | Jumlah Rancangan Perda tentang APBD dan Rperkada yang terususn | 180.868.890 | 2 Peraturan | 204.199.900 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tujuan** | **Sasaran** | **Kode** | **Program dan Kegiatan** | | **Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)** | **Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan  (2018)** | **Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan** | | | | | | | | | | | | | **Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab** | **Lokasi** |
| **2019** | | **2020** | | **2021** | | **2022** | | **2023** | | **Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah (2023)** | | |
| **target** | **Rp** | **target** | **Rp** | **target** | **Rp** | **target** | **Rp** | **target** | **Rp** | **target** | **Rp** |  | |  |
|  |  |  |  | Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD | Jumlah Rancangan Perda Ttg P-APBD & R-Perkada yang tersusun | 150.868.750 | 2 Peraturan | 212.962.100 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |  | |  |
|  |  |  |  | Penyusunan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah | Jumlah software dan hardware SIPKD | 237.500.000 | 2 UNIT | 314.000.000 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |  | |  |
|  |  |  |  | One Stop Service Pelayanan Pencairan Anggaran | Jumlah Pelaksana yang menerima pencairan SP2D | 9.250.000 | 3000 orang | 17.000.000 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |  | |  |
|  |  |  |  | Penatausahaan Pengelolaan Gaji PNS dan Non PNS | Jumlah PNS dan Non PNS yang menerima Gaji | 244.133.358 | 160.776 org/bln | 323.730.000 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |  | |  |
|  |  |  |  | Fasilitasi Optimalisasi Fungsi BUD | Jumlah Fasilitas Pelayanan Fungsi Bandahara Umum Daerah | 192.550.000 | 27000 lembar | 349.900.000 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |  | |  |
|  |  |  |  | Fasilitasi Peningkatan Tehnis & Administrasi Pegawai | Jumlah Pembayaran Gaji Non PNS | 684.000.000 | 266 orang | 497.000.000 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tujuan** | **Sasaran** | **Kode** | **Program dan Kegiatan** | | **Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)** | **Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan  (2018)** | **Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan** | | | | | | | | | | | | | **Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab** | | **Lokasi** |
| **2019** | | **2020** | | **2021** | | **2022** | | **2023** | | **Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah (2023)** | |  | |  | |
| **target** | **Rp** | **target** | **Rp** | **target** | **Rp** | **target** | **Rp** | **target** | **Rp** | **target** | **Rp** |
|  |  |  |  | Fasilitasi Sekretariat Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) | Jumlah fasilitasi sekretariat TAPD |  | 1.311.600.000 | 12 kali | 1.428.000.000 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |  | |
|  |  |  |  | Fasilitasi Pengerjaan SPD | Jumlah pengerjaan SPD | 41.708.002 | 7000 lembar | 69.000.000 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |  | |  | |
|  |  |  |  | Koordinasi Pelaksanaan Fungsi Perbendaharaan | Jumlah Koordinasi & Sosialisasi | 74.993.000 | 4 kali | 66.930.000 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |  | |  | |
|  |  |  |  | Fasilitasi Optimalisasi Fungsi PPKD | Jumlah Proposal Dana Bantuan | 168.608.801 | 12500 proposal | 285.858.801 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |  | |  | |
|  |  |  |  | Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD | Jumlah Raperda dan Raperbup Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD yang tersusun | 90.000.000 | 2 Peraturan | 90.000.000 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |  | |  | |
|  |  |  |  | Peningkatan Pelaksanaan Akuntansi SKPD | Jumlah kegiatan sosialisasi, rapat koordinasi, monitoring dan analisis akuntansi | 195.000.000 | 3 kali | 195.000.000 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |  | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tujuan** | **Sasaran** | **Kode** | **Program dan Kegiatan** | | **Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)** | **Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan  (2018)** | **Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan** | | | | | | | | | | | | **Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab** | **Lokasi** |
| **2019** | | **2020** | | **2021** | | **2022** | | **2023** | | **Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah (2023)** | |
| **target** | **Rp** | **target** | **Rp** | **target** | **Rp** | **target** | **Rp** | **target** | **Rp** | **target** | **Rp** |  |  |
|  |  |  |  | Pengendalian Realisasi Anggaran dan Realiasasi Pendapatan Daerah | Jumlah Pengendalian Realisasi Anggaran dan Realiasasi Pendapatan Daerah | 72.000.000 | 4 kali | 79.200.000 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  |  | Koordinasi Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggung jawaban pelaksanaan APBD | Jumlah Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD | 100.000.000 | 2 jenis buku | 118.800.000 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  |  | Fasilitasi Penyusunan Laporan Keuangan SKPD | Jumlah Peserta Pembinaan dan Penyusunan Laporan Keuangan | 80.000.000 | 68 OPD | 80.000.000 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  |  | Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah | Jumlah Penysn. LKPD (bln,Tribulan,Semester & Th) | 268.894.168 | 23 laporan | 258.894.168 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  |  | Pengamanan Asset Daerah | Jumlah sertifikat Rencana Pengamanan BMD | 236.907.075 | 20 Sertifikat | 389.283.075 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tujuan** | **Sasaran** | **Kode** | **Program dan Kegiatan** | | **Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)** | **Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan  (2018)** | **Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan** | | | | | | | | | | | | **Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab** | **Lokasi** |
| **2019** | | **2020** | | **2021** | | **2022** | | **2023** | | **Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah (2023)** | |  |  |
| **target** | **Rp** | **target** | **Rp** | **target** | **Rp** | **target** | **Rp** | **target** | **Rp** | **target** | **Rp** |
|  |  |  |  | Penertiban Penggunaan dan Pemanfaatan Barang Milik Daerah | Jumlah Laporan Pemanfaatan Barang Milik Daerah | 245.689.200 | 65 OPD | 145.689.200 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  |  | Penghapusan Asset | Jumlah SK Rencana Penghapusan & kebutuhan BMD | 166.694.000 | 7 SK | 154.318.000 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  |  | Pembinaan Pengelolaan Asset Daerah | Jumlah sinkronisasi terhadap pendataan asset | 339.739.436 | 4 kali | 341.141.813 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  |  | Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah | Jumlah rekonsiliasi data BMD | 187.258.400 | 4 kali | 229.218.250 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  |  | Pemantapan penerapan sistem tata kelola barang daerah | Jumlah Pemantapan penerapan sistem tata kelola barang daerah | 306.889.850 | 4 kali | 350.000.000 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  |  | Perencanaan dan Penyusunan RKBMD | Jumlah tersusunnya lap.RKBMD pengadaan & RKBMD pemeliharaan APBD/P.APBD | 0 | 65 OPD | 124.000.000 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  |  | Asuransi Gedung Dan Kendaraan | Jumlah Aset yang diasuransikan | 33.000.000 | 4 Asset | 34.000.000 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  |  | Sinkronisasi Penerimaan Bagi Hasil Pajak Pusat dan Propinsi | Jumlah Koordinasi dan Konsultasi Penerimaan Bg Hsl Ke Pst | 183.518.250 | 30 Laporan | 148.518.250 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tujuan** | **Sasaran** | **Kode** | **Program dan Kegiatan** | | **Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)** | **Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan  (2018)** | **Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan** | | | | | | | | | | | | **Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab** | **Lokasi** | |
| **2019** | | **2020** | | **2021** | | **2022** | | **2023** | | **Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah (2023)** | |
| **target** | **Rp** | **target** | **Rp** | **target** | **Rp** | **target** | **Rp** | **target** | **Rp** | **target** | **Rp** |
|  |  |  |  | Penatausahaan Pembukuan dan Pelaporan Penerimaan Pendapatan Kabupaten Pasuruan | Jumlah Laporan tertib Adm Penerimaan Pendapatan Kab. | 683.590.700 | 24 Laporan | 718.590.700 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  |  | Penetapan dan Perhitungan Pajak Daerah | Jumlah penetapan SKP dan Nota perhitung | 850.220.000 | 27.504 WP | 848.220.000 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  |  | Penyampaian SPOPD | Jumlah penyampaian hasil penetapan PBB | 1.893.816.000 | 750.000 WP | 2.006.652.000 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  |  | Pendaftaran dan Pendataan Pajak Daerah | Jumlah Jenis Pendaftaran &Pendataan Oby Pjk Daerah | 1.117.373.900 | 755.000 OP | 2.111.537.900 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  |  | Monitoring Pajak Daerah | Jumlah Wilayah yang di Monitoring | 165.225.900 | 16 Wilayah | 165.225.905 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  |  | Perencanaan dan Penyusunan Penerimaan Pendapatan Daerah | Jumlah Penyusunan Penerimaan Pendapatan Daerah | 153.150.005 | 2 kali | 153.150.000 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  |  | Sosialisasi Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah | Jumlah Sosialisasi Informasi tentang Pajak Daerah | 549.672.500 | 2 Kali | 599.400.000 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tujuan** | **Sasaran** | **Kode** | **Program dan Kegiatan** | | **Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)** | **Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan  (2018)** | **Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan** | | | | | | | | | | | | **Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab** | **Lokasi** |
| **2019** | | **2020** | | **2021** | | **2022** | | **2023** | | **Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah (2023)** | |
| **target** | **Rp** | **target** | **Rp** | **target** | **Rp** | **target** | **Rp** | **target** | **Rp** | **target** | **Rp** |  |  |
|  |  |  |  | Sosialisasi Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi | Jumlah sosialisasi Tuntutan Perbendaharaan - Tuntutan Ganti Rugi | 59.488.500 | 3 kali | 46.031.000 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  |  | Peningkatan dan pengembangan SDM tentang Pendapatan Asli Daerah | Jumlah pelaksanaan pembinaan Peningkatan SDM | 288.602.000 | 3 kali | 457.832.000 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  |  | Intensifikasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah | Jumlah Intensifikasi Penerimaan PAD | 1.041.351.975 | 280 Desa | 1.045.851.975 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  |  | Peningkatan dan Pengembangan PAD di UPTD BKD Wil.I | Jumlah Intensifikasi Penrimaan PAD di UPT Wilayah I Pandaan | 110.176.000 | 100% | 110.176.000 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  |  | Peningkatan dan Pengaembangan PAD di UPTD BKD Wil.II | Jumlah Intensifikasi Penrimaan PAD di UPT Wilayah II Bangil | 74.271.000 | 100% | 74.271.000 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  |  | Peningkatan dan Pengaembangan PAD di UPTD BKD Wil.III | Jumlah Intensifikasi Penermaan PAD di Wilayah III Grati | 54.023.000 | 100% | 54.023.000 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tujuan** | **Sasaran** | **Kode** | **Program dan Kegiatan** | | **Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)** | **Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan  (2018)** | **Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan** | | | | | | | | | | | | | **Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab** | **Lokasi** |
| **2019** | | **2020** | | **2021** | | **2022** | | **2023** | | **Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah (2023)** | | |
| **target** | **Rp** | **target** | **Rp** | **target** | **Rp** | **target** | **Rp** | **target** | **Rp** | **target** | **Rp** |  | |  |
|  |  |  | **PROGRAM PENINGKATAN PELAPORAN KEUANGAN DAERAH** | | **Persnetase Ketepatan Laporan keuangan daerah** | **0** | - | **0** | **Tepat** | **821.894.168** | - | - | - | - | - | - | - | - |  | |  |
|  |  |  |  | Peningkatan Pelaksanaan Akuntansi SKPD | Jumlah kegiatan sosialisasi, rapat koordinasi, monitoring dan analisis akuntansi | 0 | - | 0 | 3 kali | 195.000.000 | - | - | - | - | - | - | - | - |  | |  |
|  |  |  |  | Pengendalian Realisasi Anggaran dan Realiasasi Pendapatan Daerah | Jumlah Pelaksanaan APBD | 0 | - | 0 | 4 kali | 79.200.000 | - | - | - | - | - | - | - | - |  | |  |
|  |  |  |  | Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dan Raperda serta Perda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD | Jumlah terbitnya LKPD dan Raperda, Perda, Raperbub & Perbub tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD | 0 | - | 0 | 8 jenis buku | 547.694.168 | - | - | - | - | - | - | - | - |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tujuan** | **Sasaran** | **Kode** | **Program dan Kegiatan** | | **Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)** | **Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan  (2018)** | **Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan** | | | | | | | | | | | | **Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab** | **Lokasi** | |
| **2019** | | **2020** | | **2021** | | **2022** | | **2023** | | **Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah (2023)** | |
| **target** | **Rp** | **target** | **Rp** | **target** | **Rp** | **target** | **Rp** | **target** | **Rp** | **target** | **Rp** |
|  |  |  | **PROGRAM PENINGKATAN PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH** | | **Persentase laporan BMD sesuai standar** |  | - | **0** | **94%** | **1.733.650.338** | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  |  | Pengamanan dan Penghapusan Aset Daerah | 1. Jumlah pengajuan permohonan pensertifikatan tanah 2. Jumlah Penghapusan aset usulan skpd | 0 | - | 0 | 1. 15 berkas 2. 15 sk | 543.601.075 | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  |  | Penertiban Penggunaan dan Pemanfaatan Barang Milik Daerah | Jumlah Laporan Pemanfaatan Barang Milik Daerah | 0 | - | 0 | 65 opd | 145.689.200 | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  |  | Perencanaan dan Penyusunan RKBMD | Jumlah tersusunnya lap.RKBMD pengadaan & RKBMD pemeliharaan APBD/P.APBD | 0 | - | 0 | 65 opd | 124.000.000 | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  |  | Penatausahaan dan Pelaporan BMD | Jumlah laporan yang dihasilkan | 0 | - | 0 | 65 opd | 920.360.063 | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tujuan** | **Sasaran** | **Kode** | **Program dan Kegiatan** | | **Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)** | **Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan  (2018)** | **Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan** | | | | | | | | | | | | **Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab** | **Lokasi** |
| **2019** | | **2020** | | **2021** | | **2022** | | **2023** | | **Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah (2023)** | |
| **target** | **Rp** | **target** | **Rp** | **target** | **Rp** | **target** | **Rp** | **target** | **Rp** | **target** | **Rp** |
|  |  |  | **PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN PAJAK DAERAH** | | **SKM Layanan Pajak Daerah** |  | **-** | **0** | **70%** | **5.833.518.850** | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  |  | Penatausahaan Pembukuan dan Pelaporan Pendapatan Daerah | Jumlah Koordinasi dan Konsultasi Penerimaan Bg Hsl Ke Pst & Laporan tertib Adm. Penerimaan Pendapatan | 0 | - | 0 | 54 laporan | 867.108.950 | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  |  | Penetapan dan Perhitungan Pajak Daerah | Jumlah penetapan SKP dan Nota perhitung | 0 | - | 0 | 27.504 WP | 848.220.000 | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  |  | Penyampaian SPOPD | Jumlah penyampaian hasil penetapan PBB | 0 | - | 0 | 750.000 WP | 2.006.652.000 | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  |  | Pendaftaran dan Pendataan Pajak Daerah | Jumlah Jenis Pendaftaran & Pendataan Oby Pjk Daerah | 0 | - | 0 | 755.000 OP | 2.111.537.900 | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tujuan** | **Sasaran** | **Kode** | **Program dan Kegiatan** | | **Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)** | **Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan  (2018)** | **Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan** | | | | | | | | | | | | **Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab** | **Lokasi** |
| **2019** | | **2020** | | **2021** | | **2022** | | **2023** | | **Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah (2023)** | |
| **target** | **Rp** | **target** | **Rp** | **target** | **Rp** | **target** | **Rp** | **target** | **Rp** | **target** | **Rp** |
|  |  |  | **PROGRAM PENINGKATAN PAJAK DAERAH** | | **Persentase Peningkatan Pajak Daerah** |  | **-** | **0** | **8%** | **2.705.960.880** | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  |  | Intensifikasi Pendapatan Asli Daerah | Jumlah Wilayah yang di Monitoring | 0 | - | 0 | 16 Wilayah | 318.375.905 | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  |  | Sosialisasi dan Pengembangan Pendapatan Asli Daerah | Jumlah sosialisasi tentang PAD | 0 | - | 0 | 8 kali | 1.103.263.000 | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  |  | Penagihan dan Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah | Jumlah penagihan pajak daerah | 0 | - | 0 | 282 desa | 1.045.851.975 | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  |  | Peningkatan dan Pengembangan PAD di UPT Pelayanan Pajak Daerah Wilayah I | Jumlah Intensifikasi Penerimaan PAD di UPT Pelayanan Pajak Daerah Wilayah I | 0 | - | 0 | 100% | 137.187.500 | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  |  | Peningkatan dan Pengembangan PAD di UPT Pelayanan Pajak Daerah Wilayah II | Jumlah Intensifikasi Penerimaan PAD di UPT Pelayanan Pajak Daerah Wilayah I | 0 | - | 0 | 100% | 101.282.500 | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tujuan** | **Sasaran** | **Kode** | **Program dan Kegiatan** | | | **Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)** | **Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan  (2018)** | **Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan** | | | | | | | | | | | | **Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab** | **Lokasi** |
| **2019** | | **2020** | | **2021** | | **2022** | | **2023** | | **Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah (2023)** | |
| **target** | **Rp** | **target** | **Rp** | **target** | **Rp** | **target** | **Rp** | **target** | **Rp** | **target** | **Rp** |
| Meningkatnya Birokrasi yang bersih dan akuntabel |  |  |  | | | **Opini BPK** |  |  |  |  |  |  |  | WTP |  | WTP |  | WTP |  |  |  |
|  | Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah |  |  | | | **Nilai Sakip OPD** |  |  |  |  |  |  |  | Nilai | **80.8** | Nilai | **81** | Nilai | **82** |  |  |
|  |  | **5.02.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | | | **Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan** | - | - | - | - | - | **100%** | **106.108.407.170** | 100% | **119.710.000.000** | 100% | **127.710.000.000** | 100% | **127.710.000.000** |  |  |
|  |  | **5.02.01.2.01** |  | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | | **Persentase penyelesaian dokumen Perencanaan BKD yang selaras dengan RPJMD** | - | - | - | - | - | 100% | **45.000.000** | 100% | **55.000.000** | 100% | **55.000.000** | 100% | **55.000.000** |  |  |
|  |  | 5.02.01.2.01.01 |  |  | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan yang tersusun | - | - | - | - | - | 7 Dokumen | 26.255.000 | 7 Dokumen | 30.000.000 | 7 Dokumen | 30.000.000 | 7 Dokumen | 30.000.000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | *Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah* |  |  |  |  |  |  |  |  |  | *7 Dokumen* |  | *7 Dokumen* |  |  |  |
|  |  | 5.02.01.2.01.07 |  |  | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Evaluasi Kinerja yang ditindaklanjuti | - | - | - | - | - | 5  Dokumen | 18.745.000 | 5  Dokumen | 25.000.000 | 5  Dokumen | 25.000.000 | 5  Dokumen | 25.000.000 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tujuan** | **Sasaran** | **Kode** | **Program dan Kegiatan** | | | **Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)** | **Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan  (2018)** | **Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan** | | | | | | | | | | | | **Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab** | **Lokasi** |
| **2019** | | **2020** | | **2021** | | **2022** | | **2023** | | **Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah (2023)** | |
| **target** | **Rp** | **target** | **Rp** | **target** | **Rp** | **target** | **Rp** | **target** | **Rp** | **target** | **Rp** |
|  |  | **5.02.01.2.02** |  | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | | Persentase pembayaran gaji ASN | - | - | - | - | - | 100% | **104.631.316.893** | 100% | **117.288.000.000** | 100% | **124.687.000.000** | 100% | **124.687.000.000** |  |  |
|  |  | 5.02.01.2.02.01 |  |  | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah bulan gaji dan tunjangan ASN yang tersedia | - | - | - | - | - | 14 bulan | 103.094.016.893 | 14 bulan | 115.583.000.000 | 14 bulan | 122.922.000.000 | 14 bulan | 122.922.000.000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | *Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN* |  |  |  |  |  |  |  |  |  | *150 orng/bln* |  | *150 orng/bln* |  |  |  |
|  |  | 5.02.01.2.02.02 |  |  | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Jumlah pembayaran Jasa Petugas Penunjang Kegiatan Kantor/Lapangan melalui perjanjian/perikatan | - | - | - | - | - | 24 laporan | 1.537.300.000 | 24 laporan | 1.705.000.000 | 24 laporan | 1.755.000.000 | 24 laporan | 1.755.000.000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | *Jumlah dokumen Hasil penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN* |  |  |  |  |  |  |  |  |  | *24 Dokumen* |  | *24 Dokumen* |  |  |  |
|  |  | 5.02.01.2.02.03 |  |  | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 6318 Dokumen | 10.000.000 | 6318 Dokumen | 10.000.000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | *JUmlah DOkumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD* |  |  |  |  |  |  |  |  |  | *6318 Dokumen* |  | *6318 Dokumen* |  |  |  |
|  |  | 5.02.01.2.02.04 |  |  | Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD | Jumlah Pelaksanaan Akuntansi SKPD | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | 5.02.01.2.02.05 |  |  | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD yang tersusun | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | 5.02.01.2.02.06 |  |  | Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan | Jumlah Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | 5.02.01.2.02.07 |  |  | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD yang tersusun | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | 5.02.01.2.02.08 |  |  | Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran | Jumlah laporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tujuan** | **Sasaran** | **Kode** | **Program dan Kegiatan** | | | **Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)** | **Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan  (2018)** | **Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan** | | | | | | | | | | | | **Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab** | **Lokasi** |
| **2019** | | **2020** | | **2021** | | **2022** | | **2023** | | **Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah (2023)** | |
| **target** | **Rp** | **target** | **Rp** | **target** | **Rp** | **target** | **Rp** | **target** | **Rp** | **target** | **Rp** |  |  |
|  |  | **5.02.01.2.05** |  | **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah** | | Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian BKD | - | - | - | - | - | 100% | **35.050.000** | 100% | **50.000.000** | 100% | **60.000.000** | 100% | **60.000.000** |  |  |
|  |  | 5.02.01.2.05.09 |  |  | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Jumlah aparatur yang mengikuti diklat formal dan non formal | - | - | - | - | - | 10 Orang | 35.050.000 | 10 Orang | 50.000.000 | 10 Orang | 60.000.000 | 10 Orang | 60.000.000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | *Jumlah Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti Pendidikan dan pelatihan* |  |  |  |  |  |  |  |  |  | *10 Orang* |  | *10 Orang* |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | Jumlah dokumen administrasi kepegawaian | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | **5.02.01.2.06** |  | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | | Persentase Persentase terpenuhinya sarana dan prasarana umum | - | - | - | - | - | 100% | **421.148.430** | 100% | **492.000.000** | 100% | **470.000.000** | 100% | **470.000.000** |  |  |
|  |  | 5.02.01.2.06.01 |  |  | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | - | - | - | - | - | 20 unit | 21.626.000 | 20 unit | 25.000.000 | 20 unit | 30.000.000 | 20 unit | 30.000.000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | *Jumlah paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor* |  |  |  |  |  |  |  |  |  | *20 paket* |  | *20 paket* |  |  |  |
|  |  | 5.02.01.2.06.02 |  |  | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor | - | - | - | - | - | 18 unit | 52.381.550 | 18 unit | 20.000.000 | 18 unit | 25.000.000 | 18 unit | 25.000.000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | *Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang di sediakan* |  |  |  |  |  |  |  |  |  | *18 paket* |  | *18 paket* |  |  |  |
|  |  | 5.02.01.2.06.03 |  |  | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Jumlah pembelian peralatan dan perlengkapan kantor | - | - | - | - | - | 150 buah | 38.712.190 | 150 buah | 25.000.000 | 150 buah | 30.000.000 | 150 buah | 30.000.000 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tujuan** | **Sasaran** | **Kode** | **Program dan Kegiatan** | | | **Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)** | **Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan  (2018)** | **Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan** | | | | | | | | | | | | **Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab** | **Lokasi** |
| **2019** | | **2020** | | **2021** | | **2022** | | **2023** | | **Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah (2023)** | |
| **target** | **Rp** | **target** | **Rp** | **target** | **Rp** | **target** | **Rp** | **target** | **Rp** | **target** | **Rp** |
|  |  |  |  |  |  | *Jumlah Paket*  *Peralatan Rumah Tangga yang di sediakan* |  |  |  |  |  |  |  |  |  | *150 paket* |  | *150 paket* |  |  |  |
|  |  | 5.02.01.2.06.05 |  |  | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Persentase Pemenuhan kebutuhan barang cetakan dan penggandaan | - | - | - | - | - | 100% | 62.373.000 | 100% | 72.000.000 | 100% | 75.000.000 | 100% | 75.000.000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | *Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan* *yang di sediakan* |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 Paket |  | 10 Paket |  |  |  |
|  |  | 5.02.01.2.06.08 |  |  | Fasilitasi Kunjungan Tamu | jumlah Kunjungan tamu | - | - | - | - | - | 25 kali | 8.665.690 | 25 kali | 50.000.000 | 25 kali | 60.000.000 | 25 kali | 60.000.000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | *Jumlah laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu* |  |  |  |  |  |  |  |  |  | *25 laporan* |  | *25 laporan* |  |  |  |
|  |  | 5.02.01.2.06.09 |  |  | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan rapat koordinasi dan konsultasi OPD | - | - | - | - | - | 80 laporan | 187.390.000 | 80 laporan | 300.000.000 | 80 laporan | 350.000.000 | 80 laporan | 350.000.000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | *Jumlah laporan penyelenggaraan rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD* |  |  |  |  |  |  |  |  |  | *80 laporan* |  | *80 laporan* |  |  |  |
|  |  | 5.02.01.2.06.10 |  |  | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah bahan lofistik kantor | - | - | - | - | - | 300 unit | 50.000.000 | 0 | 0 | 300 unit | 0 | 300 unit | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | *Jumlah Paket bahan Logistik Kantor yang di sediakan* |  |  |  |  |  |  |  |  |  | *300 unit* |  | *300 unit* |  |  |  |
|  |  | 5.02.01.2.06.11 |  |  | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | 5.02.01.2.06.12 |  |  | Penyediaan Bahan/Material | Jumlah Penyediaan Bahan/Material | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tujuan** | **Sasaran** | **Kode** | **Program dan Kegiatan** | | | **Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)** | **Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan  (2018)** | **Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan** | | | | | | | | | | | | **Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab** | **Lokasi** | |
| **2019** | | **2020** | | **2021** | | **2022** | | **2023** | | **Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah (2023)** | |  |
| **target** | **Rp** | **target** | **Rp** | **target** | **Rp** | **target** | **Rp** | **target** | **Rp** | **target** | **Rp** |
|  |  | 5.02.01.2.06.13 |  |  | | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | Jumlah Dokumen Arsip Dinamis SKPD | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | |
|  |  | 5.02.01.2.06.14 |  |  | | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | Jumlah Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik SKPD | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | |
|  |  | **5.02.01.2.07** |  | **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | | Persentase Pelaksanaan Pengadaan BMD sesuai rencana | - | - | - | - | - | **100%** | **319.017.000** | **100%** | **810.000.000** | **100%** | **810**  **.000.000** | **100%** | **320.000.000** |  |  |
|  |  | 5.02.01.2.07.01 |  |  | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Dinas yang dibeli | - | - | - | - | - | 1 unit | 0 | 1 unit | 500.000.000 | - | 500.000.000 | - | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | *Jumlah unit Kendaraan Perorangan Dinas atau kendaraan Dinas Jabatan yang di sediakan* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | *2 unit* |  | *2 unit* |  |  |
|  |  | 5.02.01.2.07.02 |  |  | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan lapangan yang dibeli | - | - | - | - | - | 2 unit | **0** | 2 unit | 40.000.000 | 2 unit | 40.000.000 | 2 unit | 40.000.000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | *Jumlah unit Kendaraan Perorangan Dinas atau lapangan yang di sediakan* |  |  |  |  |  |  |  |  |  | *1 unit* |  | *1 unit* |  |  |  |
|  |  | 5.02.01.2.07.05 |  |  | Pengadaan Mebel | Jumlah unit Pengadaan mebeleur | - | - | - | - | - | 10 unit | 13.500.000 | 10 unit | 20.000.000 | 2 unit | 30.000.000 | 2 unit | 30.000.000 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tujuan** | **Sasaran** | **Kode** | **Program dan Kegiatan** | | | **Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)** | **Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan  (2018)** | **Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan** | | | | | | | | | | | | **Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab** | **Lokasi** |
| **2019** | | **2020** | | **2021** | | **2022** | | **2023** | | **Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah (2023)** | |
| **target** | **Rp** | **target** | **Rp** | **target** | **Rp** | **target** | **Rp** | **target** | **Rp** | **target** | **Rp** |
|  |  |  |  |  |  | *Jumlah Paket mebel yang di sediakan* |  |  |  |  |  |  |  |  |  | *10 paket* |  | *10 paket* |  |  |  |
|  |  | 5.02.01.2.07.06 |  |  | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah unit peralatan dan mesin yang dibeli | - | - | - | - | - | 30 Unit | 305.517.000 | 30 Unit | 250.000.000 | 30 Unit | 250.000.000 | 30 Unit | 250.000.000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | *Jumlah unit Peralatan dan mesin lainnya yang di sediakan* |  |  |  |  |  |  |  |  |  | *30 Unit* |  | *30 Unit* |  |  |  |
|  |  | **5.02.01.2.08** |  | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah | - | - | - | - | - | 100% | **197.840.047** | 100% | **290.000.000** | 100% | **323.000.000** | 100% | **323.000.000** |  |  |  |
|  |  | 5.02.01.2.08.01 |  |  | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah surat yang dikirim | - | - | - | - | - | 100 pucuk | 7.665.000 | 100 pucuk | 5.000.000 | 100 pucuk | 5.000.000 | 100 pucuk | 5.000.000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | *Jumlah laporan Penyediaan surat menyurat* |  |  |  |  |  |  |  |  |  | *100 pucuk* |  | *100 pucuk* |  |  |  |
|  |  | 5.02.01.2.08.02 |  |  | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah rekening pembayaran jasa komunikasi, air dan listrik yang dibayar | - | - | - | - | - | 20 rek/bln | 110.395.783 | 20 rek/bln | 225.000.000 | 20 rek/bln | 250.000.000 | 20 rek/bln | 250.000.000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | *Jumlah laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik* |  |  |  |  |  |  |  |  |  | *20 rek/bln* |  | 20 rek/bln |  |  |  |
|  |  | 5.02.01.2.08.03 |  |  | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah pembelian peralatan dan perlengkapan kantor | - | - | - | - | - | 18 unit | 18.600.000 | 18 unit | 25.000.000 | 18 unit | 28.000.000 | 18 unit | 28.000.000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | *Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan Perlengkapan Kantor* |  |  |  |  |  |  |  |  |  | *18 unit* |  | *18 unit* |  |  |  |
|  |  | 5.02.01.2.08.04 |  |  | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Prosentase Pelayanan umum yang terbayarkan | - | - | - | - | - | 100% | 61.179.264 | 100% | 35.000.000 | 100% | 40.000.000 | 100% | 40.000.000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | *Jumlah laporan penyediaan jasa Pelayanan umum Kantor yang di sediakan* |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 laporan |  | 10 laporan |  |  |  |
|  |  | **5.02.01.2.09** |  | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | | Persentase pelaksanaan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah | - | - | - | - | - |  | **459.034.800** |  | **725.000.000** |  | **795.000.000** |  | **795.000.000** |  |  |
|  |  | 5.02.01.2.09.01 |  |  | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabata | - | - | - | - | - | 20 unit | 361.879.200 | 20 unit | 200.000.000 | 20 unit | 200.000.000 | 20 unit | 200.000.000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | *Jumlah Kendaraan Dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya* |  |  |  |  |  |  |  |  |  | *20 unit* |  | *20 unit* |  |  |  |
|  |  | 5.02.01.2.09.02 |  |  | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah kali Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | - | - | - | - | - |  | 0 | 50 unit | 300.000.000 | 50 unit | 300.000.000 | 50 uniti | 300.000.000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | *Jumlah Kendaraan Dinas operasional atau lapangan yang dipelihara atau dibayarkan pajak dan perijinannya* |  |  |  |  |  |  |  |  |  | *50 unit* |  | *50 unit* |  |  |  |
|  |  | 5.02.01.2.09.05 |  |  | Pemeliharaan Mebel | Jumlah Pemeliharaan Mebeler | - | - | - | - | - | 10 unit | 9.000.000 | 10 unit | 25.000.000 | 10 unit | 25.000.000 | 10 unit | 25.000.000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | *Jumlah Mebel yang dipelihara* |  |  |  |  |  |  |  |  |  | *10 unit* |  | *10 unit* |  |  |  |
|  |  | 5.02.01.2.09.06 |  |  | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah unit peralatan dan mesin yang terpelihara | - | - | - | - | - | 30 unit | 58.323.600 | 30 unit | 50.000.000 | 30 unit | 70.000.000 | 30 unit | 70.000.000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | *Jumlah Peralatan dan mesin Lainnya yang dipelihara* |  |  |  |  |  |  |  |  |  | *30 unit* |  | *30 unit* |  |  |  |
|  |  | 5.02.01.2.09.09 |  |  | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhab | - | - | - | - | - | 2 kali | 29.832.000 | 2 kali | 150.000.000 | 2 kali | 200.000.000 | 2 kali | 200.000.000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | *Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhab* |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 kali |  | 2 kali |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tujuan** | **Sasaran** | **Kode** | **Program dan Kegiatan** | | | **Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)** | **Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan  (2018)** | **Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan** | | | | | | | | | | | | **Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab** | **Lokasi** |
| **2019** | | **2020** | | **2021** | | **2022** | | **2023** | | **Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah (2023)** | |
| **target** | **Rp** | **target** | **Rp** | **target** | **Rp** | **target** | **Rp** | **target** | **Rp** | **target** | **Rp** |
|  | Meningkatnya Tata Kelola Keuangan dan Aset Daerah |  |  | | | Laporan Keuangan dengan opini WTP |  |  |  |  |  |  |  | 2 laporan |  | 2 laporan |  | 2 laporan |  |  |  |
|  |  | **0.:02:02** | **PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH** | | | Persentase Penyusunan APBD dan laporan keuangan tepat waktu sesuai ketentuan | - | - | - | - | - | 100% | **667.386.190.421** | 100% | **738.108.926.323** | 100% | **738.232.926.323** | 100% | **738.232.926.323** |  |  |
|  |  | **5.02.02.2.01** |  | **Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah** | | Penyelesaian dokumen anggaran daerah tepat waktu | - | - | - | - | - | 100% | **1.499.999.850** | Tepat  waktu | **2.100.000.000** | Tepat  waktu | **2.100.000.000** | Tepat  waktu | **2.100.000.000** |  |  |
|  |  | 5.02.02.2.01.01 |  |  | Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS | JumlahProsentase Dokumen RKA OPD yang di setujui oleh TAPD | - | - | - | - | - | 100 % | 210.713.640 | 100 % | 225.000.000 | 100 % | 225.000.000 | 100 %n | 225.000.000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | *Jumlah Dokumen KUA dan PPAS* |  |  |  |  |  |  |  |  |  | *2 dokumen* |  | *2 dokumen* |  |  |  |
|  |  | 5.02.02.2.01.02 |  |  | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS | Jumlah Prosentase Dokumen Perubahan RKA OPD yang di setujui oleh TAPD | - | - | - | - | - | 100 % | 113.566.700 | 100 % | 250.000.000 | 100 % | 250.000.000 | 100 % | 250.000.000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | *Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang di susun* |  |  |  |  |  |  |  |  |  | *2 dokumen* |  | 2 dokumen |  |  |  |
|  |  | 5.02.02.2.01.03 |  |  | Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD | Prosentase jumlah dokumen RKA-SKPD | - | - | - | - | - | 100% | 52.164.500 | 100% | 50.000.000 | 100% | 50.000.000 | 100% | 50.000.000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | *Jumlah RKA-SKPD yang di Verifikasi* |  |  |  |  |  |  |  |  |  | *58 RKA SKPD* |  | *58 RKA SKPD* |  |  |  |
|  |  | 5.02.02.2.01.04 |  |  | Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD | Prosentase jumlah dokumen Perubahan RKA-OPD | - | - | - | - | - | 100% | 44.515.800 | 100% | 50.000.000 | 100% | 50.000.000 | 100% | 50.000.000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | *Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang di Verifikasi* |  |  |  |  |  |  |  |  |  | *2 Dokumen* |  | *2 Dokumen* |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tujuan** | **Sasaran** | **Kode** | **Program dan Kegiatan** | | | **Indikator Kinerja Tujuan,Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)** | **Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan  (2018)** | **Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan** | | | | | | | | | | | | **Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab** | **Lokasi** |
| **2019** | | **2020** | | **2021** | | **2022** | | **2023** | | **Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah (2023)** | |
| **target** | **Rp** | **target** | **Rp** | **target** | **Rp** | **target** | **Rp** | **target** | **Rp** | **target** | **Rp** |
|  |  | 5.02.02.2.01.07 |  |  | Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD | Jumlah tersusunnya dokumen Perda tentang APBD dan Perkada tentang Penjabaran APBD | - | - | - | - | - | 2 dokumen | 826.747.070 | 2 dokumen | 1.150.000.000 | 2 dokumen | 1.150.000.000 | 2 dokumen | 1.150.000.000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | *Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD* |  |  |  |  |  |  |  |  |  | *2 dokumen* |  | *2 dokumen* |  |  |  |
|  |  | 5.02.02.2.01.08 |  |  | Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD | Jumlah tersusunya dokumen Perda tentang APBD dan Perkada tentang Penjabaran Perubahan APBD | - | - | - | - | - | 2 dokumen | 252.292.140 | 2 dokumen | 300.000.000 | 2 dokumen | 300.000.000 | 2 dokumen | 300.000.000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | *Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran peruabahan APBD* |  |  |  |  |  |  |  |  |  | *2 dokumen* |  | *2 dokumen* |  |  |  |
|  |  | 5.02.02.2.01.13 |  |  | Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota | Jumlah Peserta OPD yang mengikuti pembinaan | - | - | - | - | - | - | 0 | 56 OPD | 75.000.000 | 56 OPD | 75.000.000 | 56 OPD | 75.000.000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | *Jumlah orang yang mengikuti pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota* |  |  |  |  |  |  |  |  |  | *100 Orang* |  | *100 Orang* |  |  |  |
|  |  | 5.02.02.2.01.09 |  |  | Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran | Jumlah regulasi tentang teknis penyusunan anggaran pembiayaan SKPD yang tersusun dan ditetapkan | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Numlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran |  |  |  |  |  |  |  |  |  | *4 Dokumen* |  | *4 Dokumen* |  |  |  |
|  |  | 5.02.02.2.01.10 |  |  | Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan | Jumlah koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan yang dilaksanakan kepada seluruh SKPD | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | *Jumlah Dokumen hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan* |  |  |  |  |  |  |  |  |  | *4 Dokumen* |  | *4 Dokumen* |  |  |  |
|  |  | 5.02.02.2.01.11 |  |  | Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah | Jumlah koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja yang dilaksanakan kepada seluruh SKPD | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | *Jumlah Dokumen hasil Koordinasi Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah* |  |  |  |  |  |  |  |  |  | *4 Dokumen* |  | *4 Dokumen* |  |  |  |
|  |  | 5.02.02.2.01.12 |  |  | Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan | Jumlah koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan yang dilaksanakan kepada seluruh SKPD | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | *Jumlah Dokumen hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan* |  |  |  |  |  |  |  |  |  | *4 DOkumen* |  | *4 DOkumen* |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tujuan** | **Sasaran** | **Kode** | **Program dan Kegiatan** | | | **Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)** | **Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan  (2018)** | **Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan** | | | | | | | | | | | | **Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab** | **Lokasi** |
| **2019** | | **2020** | | **2021** | | **2022** | | **2023** | | **Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah (2023)** | |
| **target** | **Rp** | **target** | **Rp** | **target** | **Rp** | **target** | **Rp** | **target** | **Rp** | **target** | **Rp** |  |  |
|  |  | **5.02.02.2.02** |  | **Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah** | | **IKM/ SKM Layanan Perbendaharaan Daerah** | - | - | - | - | - | **80%** | **533.570.000** | 85% | **1.235.000.000** | 90% | **1.215.000.000** | 95% | **1.315.000.000** |  |  |
|  |  | 5.02.02.2.02.01 |  |  | Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah | jumlah laporan Penerimaan kas Daerah | - | - | - | - | - | 7000 laporan | 208.345.200 | 7000 laporan | 300.000.000 | 7000 laporan | 300.000.000 | 7000 laporan | 300.000.000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | jumlah lembar SP2B yang terbit |  |  |  |  |  | 4000 laporan |  | 4000 laporan |  | 4000 laporan |  | 4000 laporan |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | *Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan pnngelolaan Kas Daerah* |  |  |  |  |  |  |  |  |  | *24.200 Dokumen* |  | *24.200 Dokumen* |  |  |  |
|  |  | 5.02.02.2.02.02 |  |  | Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya | Jumlah SiLPA yang dikelola | - | - | - | - | - | - | 0 | 2 kali | 50.000.000 | 4 kali | 50.000.000 | 4 kali | 50.000.000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | *Jumlah laporan hasil Pengelaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya* |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 laporan |  | 4 laporan |  |  |  |
|  |  | 5.02.02.2.02.03 |  |  | Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD | Jumlah SPD yang diterbitkan | - | - | - | - | - | - | 0 | 25000spd | 150.000.000 | 25000spd | 150.000.000 | 25000spd | 150.000.000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | *Jumlah Dokumen Hasil pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD* |  |  |  |  |  |  |  |  |  | *500 Dokumen* |  | *500 Dokumen* |  |  |  |
|  |  | 5.02.02.2.02.04 |  |  | Penatausahaan Pembiayaan Daerah | Jumlah laporan analisa investasi | - | - | - | - | - | 2 laporan | 78.778.400 | 2 laporan | 100.000.000 | 2 laporan | 120.000.000 | 2 laporan | 120.000.000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | *Jumlah Dokumen hasil Penatausahaan Pembiayaan Daerah* |  |  |  |  |  |  |  |  |  | *2 Dokumen* |  | *2 Dokumen* |  |  |  |
|  |  | 5.02.02.2.02.05 |  |  | Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya | Jumlah Laporan Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya | - | - | - | - | - | 7 laporan | 85.823.400 | 9 laporan | 175.000.000 | 7 laporan | 200.000.000 | 7 laporan | 200.000.000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | jumlah dokumen sebagai bahan persyaratan penyaluran dan Pelaporan Laporan Dana Alokasi Khusus Fisik melalui aplikasi On Line Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OMSPAN) |  |  |  |  |  | 27 laporan |  | 27 laporan |  | 27 laporan |  | 27 laporan |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | jumlah dokumen sebagai bahan persyaratan penyaluran dan Pelaporan Dana Alokasi Khusus Non Fisik melalui aplikasi Pelaporan DAK Non Fisik  (ALADIN) |  |  |  |  |  | 45 laporan |  | 45 laporan |  | 45 laporan |  | 45 laporan |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Jumlah bahan penyusunan Laporan Dana perimbangan dan Dana transfer lainnya |  |  |  |  |  | 9 jenis laporan |  | 9 jenis laporan |  | 9 jenis laporan |  | 9 jenis laporan |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Jumlah Laporan Dana Transfer dan Perimbangan yang disusun tepat waktu |  |  |  |  |  | 9 jenis laporan |  | 9 jenis laporan |  | 9 jenis laporan |  | 9 jenis laporan |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Jumlah laporan data keuangan/dana perimbangan dana JKN dan dana Bos yang dikumpulkan dan diterima |  |  |  |  |  | 48 Laporan |  | 48 Laporan |  | 48 Laporan |  | 48 Laporan |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Jumlah laporan bahan dan data keuangaan/dana - dana transfer, dana JKN dan Bos yang diperiksa dan diklarifikasi |  |  |  |  |  | 48 Laporan |  | 48 Laporan |  | 48 Laporan |  | 48 Laporan |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Rekonsiliasi terkait dana perimbangan dana transfer lainnya |  |  |  |  |  | 6 laporan |  | 6 laporan |  | 6 laporan |  | 6 laporan |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Jumlah Laporan SKPD Pengelolaan Belanja Pegawai |  |  |  |  |  | 56 OPD |  | 56 OPD |  | 56 OPD |  | 56 OPD |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Jumlah skpd yang mengajukan SPP dan SPM Gaji PNS, PTT dan TPP yang diperiksa kelengkapannya sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku sebagai syarat kelengkapan pengajuan penerbitan SP2D |  |  |  |  |  | 56 SKPD |  | 56 SKPD |  | 56 SKPD |  | 56 SKPD |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Jumlah skpd yang Menerima, memeriksa, menelaah, mengklasifikasikan data informasi/dokumen yang berkaitan dengan kebutuhan penyusunan perencanaan penggajian pegawai untuk proses lebih lanjut. |  |  |  |  |  | 56 SKPD |  | 56 SKPD |  | 56 SKPD |  | 56 SKPD |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | jumlah Dokumen Mengolah bahan pelaksanaan penerbitan surat keterangan penghentian pembayaran (SKPP) gaji pegawai |  |  |  |  |  | 600 Dokumen |  | 600 Dokumen |  | 600 Dokumen |  | 600 Dokumen |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Jumlah skpd yang Pelaksanaaan proses integrasi perubahan data base gaji di kabupaten pasuruan |  |  |  |  |  | 56 SKPD |  | 56 SKPD |  | 56 SKPD |  | 56 SKPD |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Jumlah skpd yang Mengolah bahan pelaksanaaan penghitungan kebutuhan anggaran gaji pegawai dan TPP |  |  |  |  |  | 56 SKPD |  | 56 SKPD |  | 56 SKPD |  | 56 SKPD |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | jumlah laporan Pelaksanaan pengolahan pemberian penghargaan PTT |  |  |  |  |  | 6 Laporan |  | 6 Laporan |  | 6 Laporan |  | 6 Laporan |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | jumlah Dokumen Menyiapkan bahan pelaksanaan rekonsiliasi IWP 8% |  |  |  |  |  | 2 Dokumen |  | 2 Dokumen |  | 2 Dokumen |  | 2 Dokumen |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | jumlah DokumenMenyiapkan bahan pelaksanaan rekonsiliasi Tapera |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 Dokumen |  | 12 Dokumen |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | jumlah DokumenMenyiapkan bahan pelaksanaan rekonsiliasi BPJS Kesehatan |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 Dokumen |  | 12 Dokumen |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | jumlah DokumenMenyiapkan bahan pelaksanaan rekonsiliasi JKK-JKM |  |  |  |  |  | 12 Dokumen |  | 12 Dokumen |  | 12 Dokumen |  | 12 Dokumen |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | jumlah DokumenPelaksanaan pengelolaan database gaji ASN |  |  |  |  |  | 12 Dokumen |  | 12 Dokumen |  | 12 Dokumen |  | 12 Dokumen |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | *Jumlah Dokumen hasil Koordinasi Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya* |  |  |  |  |  |  |  |  |  | *50 Dokumen* |  | *50 Dokumen* |  |  |  |
|  |  | 5.02.02.2.02.06 |  |  | Koordinasi, Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank | Jumlah Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank yang dilaksanakan | - | - | - | - | - | - | 0 | 2 kali | 35.000.000 | 2 kali | 55.000.000 | 2 kali | 55.000.000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | *Jumlah Dokumen hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank* |  |  |  |  |  |  |  |  |  | *2 Dokumen* |  | *2 Dokumen* |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tujuan** | **Sasaran** | **Kode** | **Program dan Kegiatan** | | | **Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)** | **Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan  (2018)** | **Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan** | | | | | | | | | | | | **Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab** | **Lokasi** |
| **2019** | | **2020** | | **2021** | | **2022** | | **2023** | | **Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah (2023)** | |
| **target** | **Rp** | **target** | **Rp** | **target** | **Rp** | **target** | **Rp** | **target** | **Rp** | **target** | **Rp** |  |  |
|  |  | 5.02.02.2.02.07 |  |  | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) | Jumlah laporan Aliran Kas harian | - | - | - | - | - | - | 0 | 300 laporan | 170.000.000 | 300 laporan | 185.000.000 | 300 laporan | 185.000.000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | *Jumlah laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)* |  |  |  |  |  |  |  |  |  | *300 laporan* |  | *300 laporan* |  |  |  |
|  |  | 5.02.02.2.02.08 |  |  | Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas | Jumlah Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas | - | - | - | - | - | - | 0 | 4 kali | 50.000.000 | 4 kali | 50.000.000 | 4 kali | 50.000.000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | *Jumlah Dokumen hasil koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas* |  |  |  |  |  |  |  |  |  | *2 Dokumen* |  | *2 Dokumen* |  |  |  |
|  |  | 5.02.02.2.02.09 |  |  | Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait | Jumlah BA Evaluasi Kas pertribulan dan Koordinasi dengan SKPD terkait Pemotongan dan Penyetoran Pajak pusat | - | - | - | - | - | - | 0 | 268 BA | 75.000.000 | 268 BA | 75.000.000 | 268 BA | 75.000.000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | *Terlaksananya Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait* |  |  |  |  |  |  |  |  |  | *268 Dokumen* |  | *268 Dokumen* |  |  |  |
|  |  | 5.02.02.2.02.10 |  |  | Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan | Jumlah Peraturan penatausahaan yang diterbitkan | - | - | - | - | - | 1 Peraturan | 160.623.000 | 1 Peraturan | 50.000.000 | 1 Peraturan | 50.000.000 | 1 Peraturan | 50.000.000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | *Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan* |  |  |  |  |  |  |  |  |  | *1 Peraturan* |  | *1 Peraturan* |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tujuan** | **Sasaran** | **Kode** | **Program dan Kegiatan** | | | **Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)** | **Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan  (2018)** | **Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan** | | | | | | | | | | | | **Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab** | **Lokasi** |
| **2019** | | **2020** | | **2021** | | **2022** | | **2023** | | **Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah (2023)** | |
| **target** | **Rp** | **target** | **Rp** | **target** | **Rp** | **target** | **Rp** | **target** | **Rp** | **target** | **Rp** |  |  |
|  |  | 5.02.02.2.02.11 |  |  | Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota | Jumlah SKPD yang dibina terkait Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota | - | - | - | - | - | 2 kali | 0 | 2 kali | 80.000.000 | 2 kali | 80.000.000 | 2 kali | 80.000.000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | *JUmlah orang Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota* |  |  |  |  |  |  |  |  |  | *100 orang* |  | *100 orang* |  |  |  |
|  |  | **5.02.02.2.03** |  | **Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah** | | **Persentase Laporan Keuangan disusun tepat waktu dan sesuai standar** | - | - | - | - | - |  | **533.615.150** | 100% | **761.000.000** | 100% | **805.000.000** | 100% | **805.000.000** |  |  |
|  |  | 5.02.02.2.03.01 |  |  | Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah | jumlah Laporan Rekonsiliasi Posisi Kas dengan Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Daerah | - | - | - | - | - | 12 laporan | 119.302.820 | 12 laporan | 125.000.000 | 12 laporan | 135.000.000 | 12 laporan | 135.000.000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | *Jumlah laporan hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah* |  |  |  |  |  |  |  |  |  | *12 laporan* |  | *12 laporan* |  |  |  |
|  |  | 5.02.02.2.03.02 |  |  | Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban | jumlah Laporan Rekonsiliasi atas laporan keuangan SKPD | - | - | - | - | - | 4 laporan | 58.387.660 | 4 laporan | 36.000.000 | 4 laporan | 40.000.000 | 4 laporan | 40.000.000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | *Jumlah Dokumen hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban* |  |  |  |  |  |  |  |  |  | *4 Dokumen* |  | *4 Dokumen* |  |  |  |
|  |  | 5.02.02.2.03.04 |  |  | Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah | jumlah jenis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang dikosolidasikan | - | - | - | - | - | 7 jenis laporan | 158.728.530 | 7 jenis laporan | 165.000.000 | 7 jenis laporan | 175.000.000 | 7 jenis laporan | 175.000.000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | *Jumlah laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah* |  |  |  |  |  |  |  |  |  | *7 jenis laporan* |  | *7 jenis laporan* |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tujuan** | **Sasaran** | **Kode** | **Program dan Kegiatan** | | | **Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)** | **Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan  (2018)** | **Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan** | | | | | | | | | | | | **Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab** | **Lokasi** |
| **2019** | | **2020** | | **2021** | | **2022** | | **2023** | | **Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah (2023)** | |
| **target** | **Rp** | **target** | **Rp** | **target** | **Rp** | **target** | **Rp** | **target** | **Rp** | **target** | **Rp** |  |  |
|  |  | 5.02.02.2.03.05 |  |  | Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota | jumlah dokumen Raperda dan Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD, Raperbup dan Perbup tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD | - | - | - | - | - | 1 peraturan | 140.732.510 | *4 Dokumen* | 150.000.000 | *4 Dokumen* | 160.000.000 | *4 Dokumen* | 160.000.000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | *Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota* |  |  |  |  |  |  |  |  |  | *4 Dokumen* |  | *4 Dokumen* |  |  |  |
|  |  | 5.02.02.2.03.07 |  |  | Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah | Prosentase penyelesaian dokumen kerugian daerah | - | - | - | - | - | 100% | 25.690.110 | 100% | 35.000.000 | 100% | 45.000.000 | 100% | 45.000.000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | *Jumlah dokumen hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah* |  |  |  |  |  |  |  |  |  | *4 Dokumen* |  | *4 Dokumen* |  |  |  |
|  |  | 5.02.02.2.03.08 |  |  | Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD | Jumlah Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD yang disusun | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 dokumen | 50.000.000 | 1 dokumen | 50.000.000 | 1 dokumen | 50.000.000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | *JUmlah Dokumen Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD* |  |  |  |  |  |  |  |  |  | *1 dokumen* |  | *1 dokumen* |  |  |  |
|  |  | 5.02.02.2.03.11 |  |  | Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota | Jumlah SKPD yang dibina terkait Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban | - | - | - | - | - | 4 kali | 30.773.520 | 4 kali | 50.000.000 | 4 kali | 50.000.000 | 4 kali | 50.000.000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | *Juml;ah orag yang mengikuti Pembinaan AKuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota* |  |  |  |  |  |  |  |  |  | *100 orang* |  | *100 orang* |  |  |  |
|  |  | 5.02.02.2.03.12 |  |  | Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah | Jumlah peraturan yang ditetapkan | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 peraturan | 75.000.000 | 1 peraturan | 75.000.000 | 1 peraturan | 75.000.000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | *Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah* |  |  |  |  |  |  |  |  |  | *1 Dokumen* |  | *1 Dokumen* |  |  |  |
|  |  | 5.02.02.2.03.13 |  |  | Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah | Jumlah peraturan yang ditetapkan | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 peraturan | 75.000.000 | 1 peraturan | 75.000.000 | 1 peraturan | 75.000.000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | *JUmlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah* |  |  |  |  |  |  |  |  |  | *1 Dokumen* |  | *1 Dokumen* |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tujuan** | **Sasaran** | **Kode** | **Program dan Kegiatan** | | | **Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)** | **Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan  (2018)** | **Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan** | | | | | | | | | | | | **Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab** | **Lokasi** |
| **2019** | | **2020** | | **2021** | | **2022** | | **2023** | | **Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah (2023)** | |
| **target** | **Rp** | **target** | **Rp** | **target** | **Rp** | **target** | **Rp** | **target** | **Rp** | **target** | **Rp** |
|  |  | 5.02.02.2.03.14 |  |  | Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran | Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran yang disusun | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5.02.02.2.03.15 |  |  | Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD | Jumlah LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD yang ditindaklanjuti | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5.02.02.2.03.16 |  |  | Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota | Jumlah Pengelola Keuangan BLUD Kabupaten/Kota yang dibina | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5.02.02.2.03.17 |  |  | Koordinasi dan Penyusunan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah | Jumlah Dokumen Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah yang tersusun | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **5.02.02.2.04** |  | **Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah** | | **Persentase pelaksanaan penunjang urusan kewnangan pengelolaan keuangan daerah** | - | - | - | - | - |  | **664.819.005.421** | 100% | **734.012.926.323** | 100% | **734.212..926.323** | 100% | **734.212.926.323** |  |  |
|  |  | 5.02.02.2.04.02 |  |  | Analisis Investasi Pemerintah Daerah | Jumlah naskah analisis pendampingan Investasi Daerah yang disusun | - | - | - | - | - | - | 0 | 2 Naskah | 200.000.000 | 2 Naskah | 200.000.000 | 2 Naskah | 200.000.000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | *Jumlah laporan hasil Analisis Investasi Pemerintah Daerah* |  |  |  |  |  |  |  |  |  | *2 laporan* |  | *2 laporan* |  |  |  |
|  |  | 5.02.02.2.04.08 |  |  | Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan | Prosentase jumlah dana bantuan keuangan yang di salurkan | - | - | - | - | - | 341 desa | 595.676.659.640 | 100 % | 650.555.452.000 | 100 % | 650.555.452.000 | 100 % | 650.555.452.000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | *Jumlah laporan hasil analis Perencanaan dan penyaluran Bantuan keuangan* |  |  |  |  |  |  |  |  |  | *7 laporan* |  | *7 laporan* |  |  |  |
|  |  | 5.02.02.2.04.09 |  |  | Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak | Persenatse jumlah dana darurat yang direalisasikan | - | - | - | - | - | 100 % | 28.934.871.458 | 100 % | 35.000.000.000 | 100 % | 35.000.000.000 | 100 % | 35.000.000.000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | *Jumlah Dokumen Dana Darurat dan Mendesak* |  |  |  |  |  |  |  |  |  | *10 Dokumen* |  | *10 Dokumen* |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tujuan** | **Sasaran** | **Kode** | **Program dan Kegiatan** | | | **Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)** | **Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan  (2018)** | **Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan** | | | | | | | | | | | | **Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab** | **Lokasi** |
| **2019** | | **2020** | | **2021** | | **2022** | | **2023** | | **Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah (2023)** | |
| **target** | **Rp** | **target** | **Rp** | **target** | **Rp** | **target** | **Rp** | **target** | **Rp** | **target** | **Rp** |  |  |
|  |  | 5.02.02.2.04.10 |  |  | Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota | Prosentase dana bagi hasil Kabupaten/Kota yang disalurkan | - | - | - | - | - | 100 % | 40.207.474.323 | 100 % | 48.207.474.323 | 100 % | 48.207.474.323 | 100 % | 48.207.474.323 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | *Jumlah laporan Dana bagi hasil Kabupaten/Kota* |  |  |  |  |  |  |  |  |  | *3 laporan* |  | *3 laporan* |  |  |  |
|  |  | 5.02.02.2.04.11 |  |  | Pengelolaan Dana Cadangan Pemerintah Daerah | Jumlah Dana Cadangan Pemerintah Daerah yang dikelola | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | 5.02.02.2.04.12 |  |  | Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah | Jumlah Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah yang dibayarkan | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | 5.02.02.2.04.13 |  |  | Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pemberian Pinjaman Daerah | *Jumlah laporan Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pemberian Pinjaman Daerah* | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | *3 laporan* | *150.000.000* | *3 laporan* | *150.000.000* |  |  |
|  |  | 5.02.02.2.04.14 |  |  | Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Penerimaan Kembali Pinjaman Daerah | *Jumlah laporan Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Penerimaan Kembali Pinjaman Daerah* | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | *3 laporan* | *100.000.000* | *3 laporan* | *100.000.000* |  |  |
|  |  | 5.02.02.2.04.15 |  |  | Penyusunan Kebijakan dan Alokasi Subsidi | Jumlah Kebijakan dan Alokasi Subsidi yang tersusun | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  | **Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah** | | Persentase Sistem Informasi Keuangan Daerah yang terkelola | - | - | - | - | - | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |  |  |
|  |  |  |  |  | Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah | Jumlah Data Bidang Keuangan Daerah yang diinventarisasi dan dianalisis | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  | Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah | Jumlah Sistem Informasi Keuangan Daerah yang dipelihara | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tujuan** | **Sasaran** | **Kode** | **Program dan Kegiatan** | | | **Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)** | **Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan  (2018)** | **Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan** | | | | | | | | | | | | **Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab** | **Lokasi** |
| **2019** | | **2020** | | **2021** | | **2022** | | **2023** | | **Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah (2023)** | |
| **target** | **Rp** | **target** | **Rp** | **target** | **Rp** | **target** | **Rp** | **target** | **Rp** | **target** | **Rp** |  |
|  |  |  |  |  | Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota | Jumlah Sistem Informasi Keuangan Daerah yang dibina | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | **05:02:03** | **PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH** | | | Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah yang sesuai standar | - | - | - | - | - | **100%** | **785.192.478** | 86% | **1.391.000.000** | 86% | **1.046..000.000** | 86% | **1.046..000.000** |  |  |
|  |  | **5.02.03.2.01** |  | **Pengelolaan Barang Milik Daerah** | | Persentase penyusunan Dokumen dan Laporan Barang Milik Daerah yang sesuai standar | - | - | - | - | - | **100%** | **785.192.478** | 100% | **1.391.000.000** | 100% | **1.046..000.000** | 100% | **1.046..000.000** |  |  |
|  |  |  |  |  | | Persentase penyusunan kebijakan dan pelaksanaan pembinaan terkait Barang Milik Daerah yang sesuai standar |  |  |  |  |  |  |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  |  |  |
|  |  | 5.02.03.2.01.01 |  |  | Penyusunan Standar Harga | Jumlah dokumen Standart Harga yang disusun | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 Dokumen | 250.000.000 | 1 Dokumen | 100.000.000 | 1 Dokumen | 100.000.000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | *JUmlah standar Harga yang disusun* |  |  |  |  |  |  |  |  |  | *1 Dokumen* |  | *1 Dokumen* |  |  |  |
|  |  | 5.02.03.2.01.02 |  |  | Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah | Jumlah dokumen Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah yang disusun | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 Dokumen | 150.000.000 | 1 Dokumen | 50.000.000 | 1 Dokumen | 50.000.000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | *Jumlah standar BMD dan Kebutuhan BMD* |  |  |  |  |  |  |  |  |  | *1 Dokumen* |  | *1 Dokumen* |  |  |  |
|  |  | 5.02.03.2.01.03 |  |  | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah | Jumlah tersusunnya lap.RKBMD pengadaan & RKBMD pemeliharaan APBD/P.APBD | - | - | - | - | - | 60 laporan | 42.673.290 | 60 laporan | 45.000.000 | 60 laporan | 45.000.000 | 60 laporan | 45.000.000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | *Jumlah rencana Kebutuhan BMD* |  |  |  |  |  |  |  |  |  | *60 Dokumen* |  | *60 Dokumen* |  |  |  |
|  |  | 5.02.03.2.01.04 |  |  | Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah | Jumlah Peraturan Pengelolaan BMD yang disahkan | - | - | - | - | - | - |  | 0 | 90..000.000 | 0 | 90.000.000 | 0 | 90.000.000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | *Jumlah kebijakan pengelolaan BMD* |  |  |  |  |  |  |  |  |  | *2 Dokumen* |  | *2 Dokumen* |  |  |  |
|  |  | 5.02.03.2.01.05 |  |  | Penatausahaan Barang Milik Daerah | Jumlah OPD yang dokumen penatausahaan BMD sesuai ketentuan | - | - | - | - | - | 68 OPD | 210.082.530 | 68 OPD | 230.000.000 | 68 OPD | 230.000.000 | 68 OPD | 230.000.000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | *Jumlah laporan*  *Penatausahaan Barang Milik Daerah* |  |  |  |  |  |  |  |  |  | *4 laporan* |  | *4 laporan* |  |  |  |
|  |  | 5.02.03.2.01.07 |  |  | Pengamanan Barang Milik Daerah | Persentase perbandingan dokumen Sertifikat Tanah yang Terbit terhadap total aset tanah | - | - | - | - | - | 11% | 362.723.338 | 30% | 380.000.000 | 48% | 380.000.000 | 66% | 380.000.000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | *Jumlah laporan hasil Pengamanan BMD* |  |  |  |  |  |  |  |  |  | *500 laporan* |  | *500 laporan* |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tujuan** | **Sasaran** | **Kode** | **Program dan Kegiatan** | | | **Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)** | **Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan  (2018)** | **Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan** | | | | | | | | | | | | **Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab** | **Lokasi** | |
| **2019** | | **2020** | | **2021** | | **2022** | | **2023** | | **Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah (2023)** | |
| **target** | **Rp** | **target** | **Rp** | **target** | **Rp** | **target** | **Rp** | **target** | **Rp** | **target** | **Rp** |  |
|  |  | 5.02.03.2.01.10 |  |  | Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah | Jumlah Dokumen Penggunaan,Pemanfaatan pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan BMD yang disusun | - | - | - | - | - | 226 Dokumen | 52.553.900 | 200 Dokumen | 56.000.000 | 150 dokumen | 56.000.000 | 150 dokumen | 56.000.000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | *Jumlah Dokumen Hasil optimlisasi penggunaan,pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah* |  |  |  |  |  |  |  |  |  | *226 Dokumen* |  | *226 Dokumen* |  |  |  |
|  |  | 5.02.03.2.01.11 |  |  | Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah | Persentase kesesuaian lap. BMD PD dengan LRA dan Bidang Aset | - | - | - | - | - | 4 kali | 37.362.810 | 100% | 45.000.000 | 100% | 45.000.000 | 100% | 45.000.000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | *Jumlah laporan Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan laporan BMD* |  |  |  |  |  |  |  |  |  | *4 laporan* |  | *4 laporan* |  |  |  |
|  |  | 5.02.03.2.01.12 |  |  | Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah | Jumlah tersusunnya lap.RKBMD pengadaan & RKBMD pemeliharaan APBD/P.APBD | - | - | - | - | - | 4 dokumen | 79.796.610 | 80 laporan | 85.000.000 | 80 laporan | 85.000.000 | 80 laporan | 85.000.000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | *Tersusunnya laporan BMD yang di susun* |  |  |  |  |  |  |  |  |  | *4*  *laporan* |  | *4*  *laporan* |  |  |  |
|  |  | 5.02.03.2.01.13 |  |  | Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota | Jumlah SKPD yang dibina terkait Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 50.000.000 | 0 | 50.000.000 | 0 | 50.000.000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | *Jumlah orang yang mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota* |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 orang |  | 100 orang |  |  |  |
|  |  | 5.02.03.2.01.14 |  |  | Inventarisasi Barang Milik Daerah | Jumlah OPD yang melakukan investarisasi barang milik daerah | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | *JUmlah laporan hasil Inventarisasi BMD* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5.02.03.2.01.15 |  |  | Penilaian Barang Milik Daerah | Jumlah OPD yang Barang Milik Daerahnya dinilai | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | *Jumlah Laporan hasil Penilaian Barang Milik Daerah* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5.02.03.2.01.16 |  |  | Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah | Jumlah OPD yang Barang Milik Daerahnya diawasi dan dikelola | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | *Jumlah laporan hasil Pengawasan dan pengendalian Pengelolaan BMD* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tujuan** | **Sasaran** | **Kode** | **Program dan Kegiatan** | | | **Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan(output)** | **Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan  (2018)** | **Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan** | | | | | | | | | | | | **Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab** | **Lokasi** |
| **2019** | | **2020** | | **2021** | | **2022** | | **2023** | | **Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah (2023)** | |
| **target** | **Rp** | **target** | **Rp** | **target** | **Rp** | **target** | **Rp** | **target** | **Rp** | **target** | **Rp** |
|  |  | **05:02:04** | **PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH** | | | **Persentase Peningkatan Pendapatan Daerah** | - | - | - | - | - | **3%** | **4.705.966.948** | 3% | **5.315.000.000** | 4% | **5.370.000.000** | 4% | **5.370.000.000** |  |  |
|  |  | **5.02.04.2.01** |  | **Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah** | | 1. IKM/SKM Layanan Pajak Daerah | - | - | - | - | - | **87%** | **4.705.966.948** | 88% | **5.315.000.000** | 89% | **5.370.000.000** | 89% | **5.370.000.000** |  |  |
|  |  |  |  |  | | 2. Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) |  |  |  |  |  | **3,41%** |  | 4% |  | 4% |  | 4% |  |  |  |
|  |  | 5.02.04.2.01.01 |  |  | Perencanaan pengelolaan pajak daerah | Persentase peningkatan pajak daerah | - | - | - | - | - | 8 % | 20.002.780 | 8 % | 25.000.000 | 8 % | 30.000.000 | 8 % | 30.000.000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | *Jumlah Dokumen rencana Pengelolaan Pajak Daerah* |  |  |  |  |  |  |  |  |  | *2 dokumen* | 30.000.000 | *2 dokumen* | 30.000.000 |  |  |
|  |  | 5.02.04.2.01.02 |  |  | Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah. | Jumlah Dokumen analisis dan pengembangan Pajak Daerah | - | - | - | - | - | 2 dokumen | 53.397.730 | 2 dokumen | 55.000.000 | 2 dokumen | 55.000.000 | 2 dokumen | 55.000.000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | jumlah kebijakan pajak daerah |  |  |  |  |  | 12 dokumen kebijak |  | 12 dokumen kebijak |  | 12 dokumen kebijak |  | 12 dokumen kebijak |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | *JUmlah Dokumen hasil analisis pajak Daerah serta terlaksananya Pengembangan Pajak Daerah dan kebiajakn Pajak daerah* |  |  |  |  |  |  |  |  |  | *2 dokumen dan 12 dokumen kebijak* |  | *2 dokumen dan 12 dokumen kebijak* |  |  |  |
|  |  | 5.02.04.2.01.03 |  |  | Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah | jumlah kegiatan penyuluhan dan penyebarluasan informasi | - | - | - | - | - | 8 Kegiatan | 80.471.540 | 8 Kegiatan | 150.000.000 | 8 Kegiatan | 150.000.000 | 8 Kegiatan | 150.000.000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | *Jumlah laporan pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah* |  |  |  |  |  |  |  |  |  | *8*  *Laporan* |  | *8*  *Laporan* |  |  |  |
|  |  | 5.02.04.2.01.04 |  |  | Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah | Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah yang disediakan | - | - | - | - | - | - | 0 | 100% | 85.000.000 | 1351 WP | 85.000.000 | 1351 WP | 85.000.000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | *JUnlah sarana dan prasarana pengelolaan pajak Daerah* |  |  |  |  |  |  |  |  |  | *10 Unit* |  | *10 Unit* |  |  |  |
|  |  | 5.02.04.2.01.05 |  |  | Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah | Jumlah penerbitan dokumen SPOP/ NPWPD/ SPTPD | - | - | - | - | - | 788000 WP | 347.201.200 | 450 Dokumen | 360.000.000 | 500 Dokumen | 360.000.000 | 500 Dokumen | 360.000.000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Jumlah Obyek Pajak Daerah yang didata dan didaftarkan di UPT 1 |  |  |  |  |  | 275 Obyek Pajak |  | 300  Obyek Pajak |  | 300  Obyek Pajak |  | 300  Obyek Pajak |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Jumlah Obyek Pajak Daerah yang didata dan didaftarkan di UPT 2 |  |  |  |  |  | 175  Obyek Pajak |  | 200  Obyek Pajak |  | 200  Obyek Pajak |  | 200  Obyek Pajak |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | *JUmlah laporan hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah* |  |  |  |  |  |  |  |  |  | *15 laporan* |  | *15 laporan* |  |  |  |
|  |  | 5.02.04.2.01.06 |  |  | Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah | Jumlah Basis data objek pajak daerah yang dikelola | - | - | - | - | - | 80.1123 | 225.500.000 | 80.1123 | 230.000.000 | 80.1123 | 230.000.000 | 80.1123 | 230.000.000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | *JUmlah laporan hasil Pengolahan,pemeliharaan dan Pelaporan basis Data Pajak Daerah* |  |  |  |  |  |  |  |  |  | *53 Laporan* |  | *53 Laporan* |  |  |  |
|  |  | 5.02.04.2.01.07 |  |  | Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) | Jumlah SPPT PBB-P2 yang diterbitkan | - | - | - | - | - | 763000 WP | 1.603.095.900 | 757000 SPPT PBB-P2 | 1.750.000.000 | 767000 SPPT PBB-P2 | 1.750.000.000 | 77700 SPPT PBB-P2 | 1.750.000.000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Jumlah SPPT PBB-P2 yang didistribusikan (< Rp.500.000) |  |  |  |  |  | 8702SPPT PBB-P2 |  | 8702SPPT PBB-P2 |  | 8702 SPPT PBB-P2 |  | 8702 SPPT PBB-P2 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Jumlah SSPD BPHTB yang terverifikasi |  |  |  |  |  | 7000 SSPD BPHTB |  | 7000 SSPD BPHTB |  | 8000 SSPD BPHTB |  | 8000 SSPD BPHTB |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | umlah SPPT PBB-P2 yang didistribusikan (> Rp.500.000) |  |  |  |  |  | 5725 SPPT PBB-P2 |  | 5725 SPPT PBB-P2 |  | 5725 SPPT PBB-P2 |  | 5725 SPPT PBB-P2 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Jumlah SPPT PBB-P2 yang didistribusikan (> Rp.500.000) |  |  |  |  |  | 2977 SPPT PBB-P2 |  | 2977 SPPT PBB-P2 |  | 2977 SPPT PBB-P2 |  | 2977 SPPT PBB-P2 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | *JUmlah objek pajak yang di sesuaikan NJOPnya* |  |  |  |  |  |  |  |  |  | *500 objek Pajak* |  | *500 objek Pajak* |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tujuan** | **Sasaran** | **Kode** | **Program dan Kegiatan** | | | **Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)** | **Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan  (2018)** | **Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan** | | | | | | | | | | | | **Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab** | **Lokasi** |
| **2019** | | **2020** | | **2021** | | **2022** | | **2023** | | **Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah (2023)** | |
| **target** | **Rp** | **target** | **Rp** | **target** | **Rp** | **target** | **Rp** | **target** | **Rp** | **target** | **Rp** |
|  |  | 5.02.04.2.01.08 |  |  | Penetapan Wajib Pajak Daerah | Jumlah Objek pajak yang ditetapkan Dokumen SKP dan Nota Perhitungan | - | - | - | - | - | 801123 OP | 507.164.010 | 801123 OP | 525.000.000 | 801123 OP | 525.000.000 | 801123 OP | 525.000.000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | *Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah* |  |  |  |  |  |  |  |  |  | *801123 Dokumen* |  | *801123 Dokumen* |  |  |  |
|  |  | 5.02.04.2.01.09 |  |  | Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah | Jumlah Dokumen Wajib Pajak yang dilayani dan berkonsultasi | - | - | - | - | - | 7600 WP | 149.253.500 | 8000 WP | 155.000.000 | 8500 WP | 155.000.000 | 8500 WP | 155.000.000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | *Jumlah layanan dan Konsultasi Pajak Daerah* |  |  |  |  |  |  |  |  |  | *2 layanan* |  | *2 layanan* |  |  |  |
|  |  | 5.02.04.2.01.10 |  |  | Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah | Jumlah laporan penerimaan pajak daerah | - | - | - | - | - | 53  aporan | 623.650.000 | 54 laporan | 630.000.000 | 54 laporan | 630.000.000 | 54 laporan | 630.000.000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | *JUmlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang telah dilakukan penelitian dan Verifikasi* |  |  |  |  |  |  |  |  |  | *54 dokumen* |  | *54 dokumen* |  |  |  |
|  |  | 5.02.04.2.01.11 |  |  | Penagihan Pajak Daerah | Jumlah Dokumen terkait penagihan pajak daerah yang diterbitkan (STPD, Surat teguran, Surat Paksa, Surat penyitaan) | - | - | - | - | - | 1351000 WP | 800.846.760 | 9099 dokumen | 905.000.000 | 9149 dokumen | 925.000.000 | 9199 dokumen | 925.000.000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Jumlah Dokumen terkait penagihan pajak daerah yang disampaikan (STPD) |  |  |  |  |  |  |  | 1259 dokumen |  | 1259 dokumen |  | 1259 dokumen |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Jumlah Dokumen terkait penagihan pajak daerah yang disampaikan (STPD) |  |  |  |  |  |  |  | 840 dokumen |  | 840 dokumen |  | 840 dokumen |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | *JUmlah Dokumen hasil pelaksanaan*  *Penagihan pajak Daerah* |  |  |  |  |  |  |  |  |  | *10.000 Dokumen* |  | *10.000 Dokumen* |  |  |  |
|  |  | 5.02.04.2.01.12 |  |  | Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah | Presentase penyelesaian pengajuan keberatan pajak | - | - | - | - | - | 50 Dokumen | 44.655.000 | 100 % | 110.000.000 | 100 % | 110.000.000 | 100 % | 110.000.000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | *JUmlah Dokumen hasil penyelesaian keberatan pajak Daerah* |  |  |  |  |  |  |  |  |  | *10 Dkumen* |  | *10 Dkumen* |  |  |  |
|  |  | 5.02.04.2.01.13 |  |  | Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah | Jumlah LHM/ pemeriksaan pajak | - | - | - | - | - | 100 WP | 234.845.628 | 24 laporan | 310.000.000 | 24 laporan | 310.000.000 | 24 laporan | 310.000.000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | *JUmlah Dokumen hasil pemeriksaan serta pengendalian dan pengawasan Pajak daerah* |  |  |  |  |  |  |  |  |  | *24 Dokumen* |  | *24 Dokumen* |  |  |  |
|  |  | 5.02.04.2.01.14 |  |  | Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah | Persentase Peningkatan Retribusi Daerah | - | - | - | - | - | 3 Dokumen | 15.882.900 | 7% | 25.000.000 | 7% | 25.000.000 | 7% | 25.000.000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | *Jumlah laporan hasil pembinaan dan pengawasan pengelolaan Retribusi Daerah* |  |  |  |  |  |  |  |  |  | *2 laporan* |  | *2 laporan* |  |  |  |
| **JUMLAH** | | | | | | |  |  | **16.938.681.700** |  | **16.938.681.700** |  | **778.985.757.017** |  | **864.524.926.323** |  | **874.346.926.323** |  | **874.346.926.323** |  |  |

# BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Pasuruan Kabupaten Pasuruan berlandaskan kepada tujuan dan sasaran yang tercantum di dalam dokumen Rencana Perubahan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Indikator kinerja yang tercantum di dalam Perubahan RPJMD telah memperjelas kinerja yang akan dicapai oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Pasuruan untuk lima tahun ke depan. Penetapan indikator kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Pasuruan telah dilakukan identifikasi sesuai dengan lingkup bidang pelayanan terkait dengan memperhatikan tugas dan fungsi yang mampu mendukung pencapaian tujuan dan sasaran di Perubahan RPJMD.

Tabel 7.1 Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No | Indikator | Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD | Target Capaian Setiap Tahun | | | | | Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2023) |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | Nilai Sakip Perangkat Daerah |  | 76 | 80,5 | 80.08 | 82 | 83 |  |
| 2 | Jumlah Peningkatan Pendapatan Asli Daerah | - | 643 M | 672  M |  |  |  |  |
| 3 | Persentase laporan keuangan perangkat daerah sesuai standar akuntansi pemerintah | - | 100% | 100% |  |  |  |  |
| 4 | Laporan Keuangan dengan opini WTP |  |  |  | 2 laporan | 2 laporan | 2 laporan | 2 laporan |
| 5 | Nilai Sakip OPD |  | 76 | 80,5 | 80,8 | 81 | 82 | 82 |

# BAB VIII PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Badan pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kabupaten Pasuruan tahun 2018-2023 adalah dokumen perencanaan yang memuat Tujuan, Sasaran, Strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan Badan pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) dalam periode lima tahun yang disusun mengacu pada Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pasuruan tahun 2018-2023 sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Perencanaan Strategis P- (Renstra) dimaksud telah menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan (Renja) Badan pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Pasuruan. Disamping itu, juga sebagai bahan evaluasi bagi pelaksanaan kegiatan dengan menggunakan ukuran kinerja yang telah dicapai dari masing-masing program kegiatan yang telah dilaksanakan.

Selain menjadi pedoman, diharapkan Renstra ini mampu memberikan gambaran isu-isu strategis yang akan dihadapi oleh BPKPD Kabupaten Pasuruan dalam lima tahun serta upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi dan mengantisipasi hal tersebut, sehingga mampu memberikan hasil capaian kinerja yang optimal. Selain itu, diharapkan pula dapat memberikan manfaat bagi peningkatan dan pengembangan Badan pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Pasuruan mendatang.

BUPATI PASURUAN,

M. IRSYAD YUSUF

